PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, MORALITAS MANAJEMEN, KETAATAN PADA ATURAN AKUNTANSI, ASIMETRI INFORMASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI DI SEKTOR PEMERINTAHAN

SKRIPSI

Oleh

Nama : Dini Nur Alifah

NIM : 10312414

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2014

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, MORALITAS MANAJEMEN, KETAATAN PADA ATURAN AKUNTANSI, ASIMETRI INFORMASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI DI SEKTOR PEMERINTAHAN

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh

Nama : Dini Nur Alifah

NIM : 10312414

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku"

Yogyakarta, Januari 2014

Penyusun,



(Dini Nur Alifah)

iii

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, MORALITAS MANAJEMEN, KETAATAN PADA ATURAN AKUNTANSI, ASIMETRI INFORMASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI DI SEKTOR PEMERINTAHAN

Hasil Penelitian

Diajukan Oleh :

Nama : Dini Nur Alifah

No : 10312414

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal..Februari.....2014

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

iv

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Manajemen, Ketaatan pada Aturan Akuntansi, Asimetri Informasi, Komitmen Organisasi dan Penegakan Hukum terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di Sektor Pariwisata

Disusun Oleh : **Dini Nur Alifah**
Nomor Mahasiswa : **10312414**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan ***LULUS***
Pada tanggal : 17 Pebruari 2014

Penguji/ Pembimbing Skripsi: Hadri Kusuma, Prof. Dr., MBA. .....

Penguji : Noor Endah Cahyawati, , S.E., M.Si. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, rahmat, dan hidayah-Nya dalam penulisan skripsi dengan judul "**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Manajemen, Ketaatan pada Aturan Akuntansi, Asimetri Informasi, Komitmen Organisasi dan Penegakan Hukum terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di Sektor Pemerintahan."**

Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S-1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, disamping manfaat yang dapat disumbangkan dari hasil penelitian ini kepada semua pihak yang berkepentingan.

Banyak pihak yang telah ikhlas memberikan bantuan, oleh karena itu pada ada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT , terimakasih ya Allah atas segalanya yang Engkau berikan kepadaku, Engkau memberi kehidupan yang indah dan penuh nikmatMu sehingga saya dapat menyelesaikan S-1 dengan lancar.

2. Kedua orangtuaku tersayang, yang tak pernah lelah memberikan dukungan, nasehat, kasih sayang dan motivasi. Kalian adalah orangtua yang luar biasa, tak akan pernah cukup ucapan terimakasih mampu saya ucapkan untuk kalian. Semoga saya selalu menjadi seperti yang kalian harapkan.

3. Bapak Prof. Dr. Edy Suwandi Hamid, M.Ec. selaku rektor Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia sekaligus selaku dosen pembimbing penelitian saya. Terimakasih Bapak atas kesabaran Bapak dalam mendidik, membimbing, dan berbagi ilmu dalam penyelesaian skripsi ini. Bapak adalah salah satu motivator dan inspirator dalam hidup saya.

5. Ibu Dra. Isti Rahayu, M.Si, Ak. selaku ketua jurusan program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

6. Terimakasih kepada Dra. Reni Yendrawati, M.Si. selaku dosen wali saya.

7. Terimakasih kepada seluruh dosen program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang begitu banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi kepada penulis.

8. Terimakasih kepada seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia atas bantuannya kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

9. Terimakasih untuk kedua kakakku tersayang, Dewi Perwitasari dan Yunita Ayu Latifah yang selalu memberi semangat dan nasehat dan menemani dalam suka maupun duka. Betapa beruntungnya memiliki kakak-kakak hebat seperti kalian.

10. Toni Imam Wijanarko yang tak lelah memberikan motivasi dan dukungan. Terimakasih atas kesetiaannya dalam menemani melewati masa-masa perkuliahan, dan terimakasih karena selalu ada dalam suka maupun duka.

11. Sahabat-sahabat saya selama kuliah, Arum Widya, Dinar Putri, Citra Angelia, Dhany Irawan, Ainul Fitri, Restu Kinayomi, Nanny Fitriana, Yudha Rachmawati, Lia Amalia,

dan Ahyar Dwi Saputra. Kalian adalah sahabat yang hebat dan berbagi dalam setiap langkah yang saya lalui, terimakasih untuk semua doa, kasih sayang, motivasi, dan canda tawa yang kalian berikan kepada saya.

12. Seluruh teman-teman jurusan Akuntansi angkatan 2010 yang menjadi teman seperjuangan semasa kuliah, terimakasih dan sukses untuk kita semua.

13. Terimakasih kepada seluruh staf Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) seluruh DIY dan Kota Magelang yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian saya. Terimakasih banyak telah meluangkan waktunya untuk membantu saya menyelesaikan penelitian ini, dan terimakasih banyak atas kesabarannya dalam mengisi kuisioner.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak/ibu/Saudara/i dan teman-teman sekalian. Dalam hal ini, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena itu saran dan kritik masih diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamualaikum wr.wb

Penulis,

(Dini Nur Alifah)

ABSTRACT

This study aimed to analyze the influence of the effectiveness of internal control systems, management morality, compliance with accounting rules, asymmetry of information, organizational commitment , and law enforcement to accounting fraud tendencies in the government sector. The sampling technique used convenience sampling. Data was collected through questionnaire that given directly to officers of DPPKAD in Yogyakarta Special Region includes counties and cities, and DPPKAD in Magelang City. Statistical tools used to test the hyphotheses is multiple regression with SmartPLS. The findings of the research showed that effectiveness of internal control systems, management morality, compliance with accounting rules, asymmetry of information, organizational commitment , and law enforcement affected the occurance of accounting fraud tendencies in the government sector significantly.

Keywords: effectiveness of internal control systems, management morality, compliance with accounting rules, asymmetry of information, organizational commitment , law enforcement, intention to accounting fraud

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh sistem pengendalian internal, moralitas manajemen, ketaatan pada aturan akuntansi, asimetri informasi, komitmen organisasi dan penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling.* Pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner yang langsung diberikan kepada aparat Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi kabupaten dan kota, dan DPPKAD Kota Magelang. Alat statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah menggunakan regresi berganda (*multiple regression*) dengan bantuan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, moralitas manajemen, ketaatan pada aturan akuntansi, asimetri informasi, komitmen organisasi, penegakan hukum berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan.

Kata kunci : sistem pengendalian internal, moralitas manajemen, ketaatan pada aturan akuntansi, asimetri informasi, komitmen organisasi, penegakan hukum, kecenderungan kecurangan akuntansi

DAFTAR ISI

Halaman Sampul…..... i

Halaman Judul ii

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme..... iii

Halaman Pengesahan..... iv

Kata Pengantar..... v

Abstrak..... viii

Daftar Isi..... x

Daftar Tabel..... xv

Daftar Lampiran..... xvi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Manfaat Penelitian 7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 8

2.1.1 Teori Keagenan..... 8

2.1.2 Teori Perkembangan Moral..... 9

2.1.3 Kecurangan Akuntansi..... 11

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal..... 12

2..1.5 Moralitas Manajemen..... 17

2.1.6 Ketaatan pada Aturan Akuntansi 18

2.1.7 Asimetri Informasi..... 19

2.1.8 Komitmen Organisasi..... 21

2.1.9 Penegakan Hukum..... 22

2.2 Kerangka Pemikiran..... 23

2.3 Perumusan Hipotesis..... 24

2.3.1 Hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi..... 24

2.3.2 Hubungan Moralitas Manajemen terhadap

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi..... 25

2.3.3 Hubungan Ketaatan pada Aturan Akuntansi terhadap

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi..... 26

2.3.4 Hubungan Asimetri Informasi terhadap

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi..... 28

2.3.5 Hubungan Komitmen organisasi terhadap

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi..... 29

2.3.6 Hubungan Penegakan Hukum terhadap

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi..... 30

BAB 3 METODE PENELITIAN 32

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian..... 32

3.2 Jenis dan Sumber Data..... 32

3.3 Variabel Penelitian..... 33

3.3.1 Variabel dependen..... 33

3.3.1.1 Kecenderungan Kecurangan Akuntansi..... 33

3.3.2 Variabel independen..... 33

3.3.2.1 Sistem Pengendalian Internal..... 34

3.3.2.2 Moralitas Manajemen..... 34

3.3.2.3 Ketaatan pada Aturan Akuntansi..... 35

3.3.2.4 Asimetri Informasi..... 35

3.3.2.5 Komitmen Organisasi..... 36

3.3.2.6 Penegakan Hukum..... 36

3.4 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesa..... 36

3.4.1 Model Penelitian..... 36

3.4.2 Pengujian Hipotesa..... 37

3.4.2.1 Sistem Pengendalian Internal..... 37

3.4.2.2 Moralitas Manajemen..... 37

3.4.2.3 Ketaatan pada Aturan Akuntansi..... 38

3.4.2.4 Asimetri Informasi..... 38

3.4.2.5 Komitmen Organisasi..... 38

3.4.2.6 Penegakan Hukum..... 39

BAB 4 ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN..... 40

4.1 Analisis Deskriptif 40

4.1.1 Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner..... 40

4.2 Gambaran Umum Responden 42

4.3 Uji Kualitas Data..... 42

4.4 Pengujian Hipotesis..... 44

4.4.1 Hipotesis 1 (H1)..... 45

4.4.2 Hipotesis 2 (H2)..... 48

4.4.3 Hipotesis 3 (H3)..... 50

4.4.4 Hipotesis 4 (H4)..... 51

4.4.5 Hipotesis 5 (H5)..... 53

4.4.6 Hipotesis 6 (H6)..... 55

BAB 5 PENUTUP..... 57

5.1 Kesimpulan..... 57

5.2 Implikasi Hasil Penelitian..... 59

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA..... 64

LAMPIRAN..... 67

DAFTAR TABEL

Tabel 1..... 41

Tabel 2..... 42

Tabel 3..... 43

Tabel 5..... 45

DAFTAR LAMPIRAN

Kumpulan Tabel..... 68

Tabel 1..... 69

Tabel 2..... 70

Tabel 3..... 70

Tabel 4..... 71

Tabel 5..... 72

Surat Keterangan Penelitian..... 73

Kuisioner Penelitian..... 84

Jawaban Responden..... 93

Hasil dan Gambar Penelitian Menggunakan PLS..... 103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan akuntansi saat ini marak terjadi, baik di sektor swasta maupun di sektor pemerintahan. Kecurangan akuntansi di dua sektor tersebut mempunyai bentuk yang hampir sama, hanya berbeda dalam hal tempat atau objek. Kecurangan akuntansi pada dasarnya menekankan pada adanya kesengajaan untuk melakukan tindakan penghilangan atau penambahan jumlah tertentu sehingga terjadi salah saji dalam laporan keuangan untuk tujuan tertentu (IAI, 2001). Pada sektor publik, bentuk kecurangan akuntansi berupa korupsi, manipulasi dan penghilangan dokumen, mark-up yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, manipulasi pajak, kecurangan dalam penyusunan anggaran, kebocoran anggaran, penyalahgunaan anggaran dan kecurangan-kecurangan lain yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang 2011 setidaknya ada 436 kasus korupsi yang ditangani penegak hukum. Dari jumlah kasus itu, terdapat 1.053 tersangka dengan potensi kerugian negara Rp 2,169 triliun. Menurut peneliti Divisi Investigasi ICW, dibandingkan tren penegakan hukum tahun sebelumnya terjadi penurunan angka meski tak signifikan. Jumlah kasus korupsi yang ditangani pada 2010 sebanyak 448 kasus dengan jumlah tersangka 1.157 orang dan potensi kerugian negara Rp 3,7 triliun (Faisal, 2013).

Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi. Menurut Wilopo (2006), kecurangan akuntansi sangat dipengaruhi oleh

pengendalian internal. Pengendalian internal memegang peran penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, semakin baik pengendalian internal maka akan semakin sedikit kecurangan yang dilakukan pegawai. Banyak sekali penelitian yang meneliti pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi baik di sektor swasta maupun di sektor pemerintahan dengan sampel yang berbeda-beda, dan semuanya menunjukkan hasil yang sama yaitu berpengaruh signifikan dan negatif. Berbagai penelitian tersebut dilakukan oleh Faisal (2013), Pramudita (2013), Zulkarnain (2013), Pristiyanti (2012), dan Wilopo (2006).

Selain faktor pengendalian internal, moralitas manajemen juga sangat berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Semakin tinggi tahapan moralitas manajemen (tahapan postkonvensional), semakin manajemen memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan perusahaan semata dan berusaha menghindarkan diri dari kecenderungan kecurangan akuntansi. Wilopo (2006) telah meneliti pengaruh moralitas manajemen terhadap kecurangan akuntansi dan menunjukkan hasil bahwa moralitas berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecurangan akuntansi.

Ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai aturan atau standar akuntansi kepada para pihak yang membutuhkan. Kegagalan penyusunan laporan keuangan disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, yang dapat menimbulkan kecurangan akuntansi oleh perusahaan untuk meraup keuntungan. Masih sedikit penelitian yang meneliti pengaruh ketaatan pada aturan akuntansi terhadap kecurangan

akuntansi. Wilopo (2006) telah meneliti pengaruh ketaatan pada aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan menunjukkan hasil bahwa ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecurangan akuntansi.

Selain dari faktor-faktor diatas, asimetri informasi juga merupakan faktor penting yang menyebabkan seseorang bertindak curang. Bila terjadi asimetri informasi, manajemen perusahaan akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi mereka, demi motivasi untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi, mempertahankan jabatan dan lain-lain manajemen perusahaan juga memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat memperbaiki kompensasi dan reputasi manajemen, serta rasio-rasio keuangan perusahaan. Masih sedikit penelitian yang meneliti faktor asimetri informasi, padahal asimetri informasi juga memegang peranan penting dalam aktivitas organisasi. Wilopo (2006) telah meneliti pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan menunjukkan hasil bahwa asimetri informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kecurangan akuntansi.

Komitmen organisasi juga mempengaruhi tingkat kecurangan akuntansi. Komitmen organisasi adalah proses pada individu (pegawai) dalam mengidentifikasikan dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan organisasi (Pristiyanti, 2012).Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap kecurangan akuntansi khusus di sektor pemerintahan, yaitu Faisal (2013), Pramudita (2012) dan Pristiyanti (2012). Penelitian Faisal (2013) dan Pristiyanti (2012) menunjukkan hasil yang sama yaitu terdapat pengaruh negatif antara komitmen organisasi dengan

kecurangan akuntansi, sementara penelitian Pramudita (2013) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap fraud di sektor pemerintahan, yang berarti semakin tinggi komitmen organisasi maka tidak dapat menekan tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan.

Kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan juga disebabkan oleh penegakan hukum yang diterapkan di organisasi itu sendiri. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Zulkarnain, 2013). Terdapat beberapa peneliti yang meneliti pengaruh penegakan hukum terhadap kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan dan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Faisal (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum dengan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan, yang berarti penegakan hukum yang baik dapat mengurangi tingkat kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan. Penelitian Pramudita (2013) dan Zulkarnain (2013) menunjukkan hasil yang sama, yaitu tidak terdapat pengaruh antara penegakan hukum terhadap kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan, yang berarti semakin tinggi persepsi penegakan hukum di pemerintahan maka belum tentu dapat menekan tingkat terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan. Perbedaan hasil ketiga penelitian tersebut menyebabkan perlunya penelitian kembali untuk mencari bukti empiris pengaruh penegakan hukum terhadap kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan.

Terdapat kelemahan-kelemahan pada penelitian sebelumnya, banyak peneliti yang salah menempatkan level penelitiannya sehingga terjadi kesalahan

penggunaan variabel independennya. Penelitian Faisal (2013), Pramudita (2013), Zulkarnain (2013), Pristiyanti (2012) menempatkan variabel sistem pengendalian internal pada penelitian level karyawan dengan pegawai instansi pemerintah sebagai sampelnya, seharusnya sistem pengendalian internal berada pada level manajemen karena yang mengatur dan memantau sistem pengendalian internal adalah pihak manajemen pada suatu organisasi. Penelitian Wilopo (2005) juga salah menempatkan level penelitian, variabel sistem pengendalian internal ditempatkan pada penelitian level auditor dengan auditor BPK sebagai sampelnya, seharusnya sistem pengendalian internal berada di level manajemen. Hal yang sama juga terjadi pada variabel komitmen organisasi, penelitian Faisal (2013), Pramudita (2013), dan Pristiyanti (2012) menempatkan komitmen organisasi di level karyawan yang seharusnya berada di level manajemen, karena komitmen organisasi diukur dari aturan dan nilai-nilai yang disusun oleh manajemen pada suatu organisasi. Kesalahan penempatan juga terjadi pada variabel penegakan hukum, penegakan hukum seharusnya berada pada level manajemen, namun penelitian Faisal (2013), Pramudita (2013), dan Zulkarnain (2013) menempatkan penegakan hukum pada level karyawan. Penegakan hukum seharusnya berada pada level manajemen karena yang mengatur peraturan hukum suatu organisasi adalah dari pihak manajemen.

Mengacu pada penelitian- penelitian tersebut, penelitian ini akan meneliti kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan. Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian Faisal (2013), Pramudita (2013), dan Wilopo (2006). Penelitian ini berada pada level manajemen karena kecurangan akuntansi terungkap dari manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan

keuangan. Variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua variabel independen yang berada pada level manajemen, yaitu sistem pengendalian internal, moralitas manajemen, ketaatan pada aturan akuntansi, asimetri informasi, komitmen organisasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Manajemen, Ketaatan pada Aturan Akuntansi, Asimetri Informasi, Komitmen Organisasi dan Penegakan Hukum terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di Sektor Pemerintahan."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

> Apakah sistem pengendalian internal, moralitas manajemen, ketaatan pada aturan akuntansi, asimetri informasi, komitmen organisasi, dan penegakan hukum berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh sistem pengendalian internal, moralitas manajemen, ketaatan pada aturan akuntansi, asimetri informasi, komitmen organisasi dan penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah supaya lebih memahami faktor-faktor yang menyebabkan aparat pemerintah cenderung melakukan kecurangan akuntansi sehingga kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan dapat diminimalisir

b. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor dalam meningkatkan kualitas audit khususnya audit di sektor pemerintahan

c. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat secara umum untuk mengetahui lebih jauh mengenai berbagai kecurangan akuntansi yang terjadi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan bahwa organisasi sebagai suatu hubungan kerja sama antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) berdasarkan kontrak yang telah disepakati (Jensen and Meckling, 1976).

Teori keagenan (Jensen and Meckling, 1976) dalam Wilopo (2006) sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Teori keagenan bermaksud memecahkan dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan. Salah satunya adalah problem yang muncul bila keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen bertentangan, dan bila prinsipal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen. Bila agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka agen (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal (pemegang saham). Keinginan, motivasi dan utilitas yang tidak sama antara manajemen dan pemegang saham menimbulkan kemungkinan manajemen bertindak merugikan pemegang saham, antara lain berperilaku tidak etis dan cenderung melakukan kecurangan akuntansi.

Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989). Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yakni asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan pada manusia yang memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*selfinterest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rasionality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktifitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan.

2.1.2 Teori Perkembangan Moral

Kohlberg (1969), sebagaimana dikutip oleh Wilopo (2006) menyatakan bahwa moral berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahapan pra-konvensional, tahapan konvensional, dan tahapan pasca-konvensional.Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya seperti yang diungkapkan Kohlberg (1969). Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral, yang merupakan dasar dari perilaku etis, mempunyai enam perkembangan yang dapat teridentifikasi. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia yang semula diteliti Piaget (1958), yang menyatakan bahwa logika dan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif. Kohlberg (1969) memperluas pandangan dasar ini dengan menentukan bahwa proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama kehidupan.

Kohlberg (1969) menggunakan cerita-cerita tentang dilema moral dalam penelitiannya dan ia tertarik pada bagaimana orang-orang akan menjustifikasi tindakan-tindakan mereka bila mereka berada dalam persoalan moral yang sama. Kohlberg (1969) kemudian mengkategorisasi dan mengklasifikasi respon yang dimunculkan ke dalam enam tahap yang berbeda. Keenam tahapan tersebut dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Enam tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg (1969) yaitu:

1. Tingkat 1 (Pra-Konvensional)
   a. Orientasi kepatuhan dan hukuman
   b. Orientasi minat pribadi
2. Tingkat 2 (Konvensional)
   a. Orientasi keserasian interpersonal dan konformitas
   b. Orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial (Moralitas hukum dan aturan)
3. Tingkat 3 (Pasca-Konvensional)
   a. Orientasi kontrak sosial
   b. Prinsip etika universal

Manajemen merupakan kumpulan individu yang juga memiliki tahapan moral. Pada tahap konvensional, pertimbangan moral didasarkan atas pemahaman aturan sosial, hukum-hukum, keadilan, dan kewajiban. Manajemen pada tahap ini mulai membentuk moralitas manajemennya dengan menaati peraturan yang dalam penelitian ini adalah aturan akuntansi sebelum akhirnya terbentuk kematangan moral manajemen yang tinggi pada tahap pasca-konvensional. Manajemen pada

tahapan pasca-konvensional menunjukkan kematangan moral manajemen yang tinggi. Kematangan moral menjadi dasar dan pertimbangan manajemen dalam merancang tanggapan dan sikap terhadap isu-isu etis. Perkembangan pengetahuan moral menjadi indikasi pembuatan keputusan yang secara etis serta positif berkaitan dengan perilaku pertanggung-jawaban sosial. Karena adanya tanggung jawab sosial, manajemen dengan moralitas yang tinggi diharapkan tidak melakukan perilaku menyimpang dan kecurangan dalam kinerjanya. Termasuk adanya perilaku tidak etis dari manajemen dan kecurangan akuntansi. Moralitas manajemen yang tinggi diharapkan akan menurunkan perilaku tidak etis dan kecurangan akuntansi yang dilakukan manajemen perusahaan.

2.1.3 Kecurangan Akuntansi

IAI (2001) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai : (1) *Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan* yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan, (2) *Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva* (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang/uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara

manajemen, karyawan, atau pihak ketiga. Dari perspektif kriminal, kecurangan akuntansi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (white-collar crime). Sutherland, sebagaimana dikutip oleh Geis dan Meier (1977) dalam Wilopo (2006), menjelaskan bahwa kejahatan kerah putih dalam dunia usaha di antaranya berbentuk salah saji atas laporan keuangan, manipulasi di pasar modal, penyuapan komersial, penyuapan dan penerimaan suap oleh pejabat publik secara langsung atau tidak langsung, kecurangan atas pajak, serta kebangkrutan. Dari definisi-definisi di atas tampak perbedaan pengertian dari kecurangan akuntansi. IAI tidak secara eksplisit menyatakan bahwa kecurangan akuntansi merupakan kejahatan. Sebaliknya Sutherland (1940) sebagai pakar hukum menganggap kecurangan akuntansi sebagai kejahatan.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

Menurut COSO, dalam Puspitadewi dan Soni (2012), pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh direksi organisasi, manajemen, dan personel lainnya, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai akan tercapainya tujuan dalam kategori efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Suatu pengendalian internal bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi direksi dan manajemen mendapat pemahaman akan arah pencapain tujuan perusahaan, dengan meliputi pencapaian tujuan atau target perusahaan, termasuk juga kinerja, tingkat profitabilitas, dan keamanan sumberdaya (aset) perusahaan, kondisi lainnya yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan adalah handal dan dapat

dipercaya, yang meliputi laporan segmen dan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sudah taati dan dipatuhi dengan semestinya.

Menurut Wilopo (2005) yang secara khusus meneliti pengaruh pengendalian internal birokrasi pemerintahan, menyatakan bahwa unsur pengendalian internal birokrasi pemerintahan terdiri atas lingkungan pengawasan umum, risiko yang melekat untuk berkorupsi, serta sarana pengamanan. Tingkat lingkungan pengawasan ini ditentukan oleh sikap dan kadar pemahaman dan kepentingan pemimpin negara akan perlunya sistem pengendalian internal yang birokrasi yang kuat, tingkat hubungan pelaporan diantara unit organisasi birokrasi, tingkat kompetensi dan kejujuran dari birokrat, derajat pendelegasian dan pembatasan wewenang dari birokrasi, tingkat pemahaman birokrasi akan kebijakan dan prosedur, derajat rincian dan efektivitas dari prosedur anggaran dan pelaporannya, serta tingkat pengendalian keuangan dan pengelolaan termasuk penggunaan komputer telah dimantapkan dan diamankan dengan baik.

Risiko yang melekat untuk terjadinya korupsi ditentukan oleh tingkat kejelasan dari suatu program, serta jumlah perijinannya. Di samping itu, risiko tersebut ditentukan oleh seberapa besar anggaran untuk melaksanakan kegiatan. Semakin besar anggarannya, semakin besar kemungkinan terjadinya korupsi. Pendapatan di luar lembaga pemerintah juga mempengaruhi risiko terjadinya korupsi. Semakin besar pengaruh pendapatan keuangan di luar lembaga pemerintah, semakin besar kemungkinan terjadinya korupsi. Di samping hal tersebut, faktor tekanan jadwal dan pencapaian, derajat sentralisasi dan desentralisasi, serta bukti atau fakta yang ada sebelumnya tentang sehat tidaknya

suatu kegiatan juga akan menentukan risiko yang melekat untuk terjadinya korupsi.

Sarana pengamanan dan pengendalian juga merupakan unsur dari pengendalian internal birokrasi pemerintahan. Sarana pengamanan dan pengendalian ini terdiri dari tersedianya sumber informasi (data base dan lainnya), ketersediaan narasumber yang kompeten untuk pengumpulan informasi, tersedianya peta yang menggambarkan wilayah yang paling rawan korupsi, serta agenda untuk menurunkan tingkat kerawanan tersebut. Di samping itu, sarana pengamanan dan pengendalian ini terdiri dari ketersediaan langkah perbaikan yang nyata secara bertahap, persisten, serta sistematis oleh pemerintah untuk menurunkan tingkat korupsi.

Perkembangan pengendalian internal pemerintah di Indonesia ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian internal menurut PP SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP SPIP nomor 60 tahun 2008 tersebut, sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari lima unsur, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian, merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian suatu

organisasi dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian internal.

2. Penilaian resiko, merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya situasi yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang meliputi kegiatan identifikasi, analisis, dan mengelola risiko yang relevan bagi proses atau kegiatan organisasi.

3. Kegiatan pengendalian, merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penerapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

4. Informasi dan komunikasi. Informasi merupakan data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

5. Pemantauan, merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian intern menurut SA Seksi 319 dalam Mulyadi (2002) diantaranya adalah :

1. Manajemen, bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan secara efektif pengendalian internal organisasinya. Direktur utama perusahaan

bertanggung jawab untuk menciptakan atmosfer pengendalian di tingkat puncak, agar kesadaran terhadap pentingnya pengendalian menjadi tumbuh di seluruh organisasi. Direktur bagian keuangan dan akuntansi menjalankan peran penting dalam perancangan, implementasi, dan pemantauan sistem pelaporan keuangan organisasi, penyusunan rencana dan anggaran perusahaan, penilaian dan analisis kinerja, serta pencegahan dan pendeteksian pelaporan keuangan yang menyesatkan.

2. Dewan komisaris dan komite audit. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk memeriksa apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalan internal, sedangkan fungsi komite audit secara langsung berdampak pada auditor.
3. Auditor internal, bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya pengendalian internal entitas dan membuat rekomendasi peningkatannya.
4. Personel lain entitas. Peran dan tanggung jawab semua personel lain yang menyediakan informasi atau menggunakan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian internal harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik.
5. Auditor independen. Sebagai bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan, auditor dapat menemukan kelemahan pengendalian internal kliennya, sehingga ia dapat mengkomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada manajemen, komite audit, atau dewan komisaris.
6. Pihak luar lain. Pihak luar lain yang bertanggung jawab atas pengendalian internal entitas adalah badan pengatur (*regulatory body*), seperti Bank Indonesia dan Bapepam. Badan pengatur ini mengeluarkan persyaratan

minimum pengendalian internal yang harus dipenuhi oleh suatu entitas dan memantau kepatuhan entitas terhadap persyaratan tersebut.

2.1.5 Moralitas Manajemen

Moral adalah adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral yang artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainya. Moralitas manajemen merupakan tindakan manajemen untuk melakukan hal yang benar dan tidak berkaitan dengan keuntungan atau nilai,

Kohlberg (1969) dalam Wilopo (2006) menyatakan bahwa moral berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahapan prakonvensional, tahapan konvensional, dan tahapan postkonvensional. Moralitas manajemen pada tahapan post konvensional menunjukkan kematangan moral manajemen yang tinggi. Bernardi (1994) dalam Wilopo (2006) menjelaskan bahwa kematangan moral menjadi dasar dan pertimbangan manajemen dalam merancang tanggapan dan sikap terhadap isu-isu etis. Hasil penelitian Trevino and Youngblood (1990) serta Goolsby and Hunt (1992) yang dikutip dalam Wilopo (2006) menunjukkan bahwa perkembangan pengetahuan moral menjadi indikasi pembuatan keputusan yang secara etis serta positif berkaitan dengan perilaku pertanggung-jawaban sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa moralitas manajemen mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin tinggi tahapan moralitas manajemen (tahapan postkonvensional), semakin manajemen memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan perusahaan

semata, terlebih kepentingan pribadinya. Oleh karenanya, semakin tinggi moralitas manajemen, semakin manajemen berusaha menghindarkan diri dari kecenderungan kecurangan akuntansi.

2.1.6 Ketaatan pada Aturan Akuntansi

Aturan menurut kamus bahasa Indonesia merupakan suatu cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya diturut. Selain itu aturan juga merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Standar akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi tersebut terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi yang digunakan oleh pemerintah disebut sebagai standar akuntansi pemerintahan (SAP). Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Roberts et al (2002) dalam Wilopo (2006) berpendapat bahwa cara profesi diorganisir, melalui antara lain kode etik, dan ketaatan atas aturan akuntansi, akan memberikan pengaruh serta mengendalikan perilaku manajemen perusahaan. Faktor-faktor yang mendorong perusahaan untuk menyediakan informasi laporan keuangan adalah kekuatan pasar serta kekuatan regulasi (Foster, 1986). Regulasi ini mensyaratkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai aturan atau standar akuntansi kepada para pihak yang membutuhkan. Wolk and Tearney (1997) dalam Wilopo (2006) menjelaskan bahwa kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, akan menimbulkan kecurangan perusahaan yang tidak dapat dideteksi oleh para auditor.

2.1.7 Asimetri Informasi

Menurut Wilopo (2006), asimetri informasi adalah situasi di mana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi. Asimetri informasi ini membuat manajemen memanfaatkan ketidakselarasan informasi untuk keuntungan mereka serta sekaligus merugikan pihak luar perusahaan, seperti membiaskan informasi yang terkait dengan investor (Scott, 2003). Demikian pula berkaitan dengan teori keagenan, Healy P.M (2000) dan Lambert (2001) dalam Wilopo (2006) menyatakan bahwa keberadaan asimetri informasi akan menimbulkan permasalahan perilaku yang disfungsional bagi agen (manajemen perusahaan). Hasil penelitian Dunk (1993) dan M. van Dyck (2000) dalam Wilopo (2006), menunjukkan hubungan antara asimetri informasi dengan perilaku yang tidak etis, baik yang dilakukan bawahan maupun pihak luar perusahaan (auditor eksternal).

Hubungan antara principal dan agent menurut teori keagenan dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (asymmetrical information) karena agent berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan principal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, agent dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba.

Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara principal dan agent untuk saling mencoba memanfatkan pihak lain untu k kepentingan sendiri. Eisenhardt (1989) mengemukakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu manusia pada umunya mementingkan diri sendiri (self interest), manusia memiliki daya piker terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan manusia selalu menghindari resiko (risk adverse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut menyebabkan bahwa informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu dipertanyakan reliabilitasnya dan dapat dipercaya tidaknya informasi yang disampaikan. Terdapat dua macam asimetri informasi (Scott,2003) yaitu:

1. Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
2. Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Bila terjadi asimetri informasi, manajemen perusahaan akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi mereka, demi motivasi untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi, mempertahankan jabatan dan lain-lain (Khang,2002). Demikian pula, bila terjadi asimetri informasi, manajemen

perusahaan membuat bias atau memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat memperbaiki kompensasi dan reputasi manajemen, serta rasio-rasio keuangan perusahaan (Scott, 2003).

2.1.8 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah proses pada individu (pegawai) dalam mengidentifikasikan dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan organisasi (Pristiyanti,2012). Komitmen organisasi sendiri secara umum mengacu pada sikap-sikap dan perasaan karyawan dihubungkan dengan nilai-nilai dan cara perusahaan itu melakukan berbagai hal.

Komitmen organisasi yang tinggi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi, karena terciptanya komitmen yang tinggi akan mempengaruhi situasi kerja yang profesional. Komitmen organisasi, menurut Alwi (2001) adalah sikap karyawan untuk tetap berada dalam organisasi dan terlibat dalam upaya-upaya mencapai misi, nilai-nilai dan tujuan organisasi. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa komitmen merupakan suatu bentuk loyalitas yang lebih konkret yang dapat dilihat dari sejauh mana karyawan mencurahkan perhatian, gagasan, dan tanggung jawab dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Lebih lanjut menurut Greenberg and Baron (1997) menyatakan bahwa ada dua motif yang mendasari seseorang untuk berkomitmen pada organisasi atau unit kerjanya, antara lain:

1. Side-Best Orientation

   Side-Best Orientation ini memfokuskan pada akumulasi dari kerugian yang di alami atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh individu pada organisasi apabila meninggalkan organisasi tersebut.

2. Goal-Congruence Orientation

Memfokuskan pada tingkat kesesuaian antara tujuan personal individu dan organisasi sebagai hal yang menentukan komitmen pada organisasi.

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen merupakan suatu keadaan di mana karyawan memihak dan peduli kepada organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaannya dalam organisasi itu.

2.1.9 Penegakan Hukum

Di dalam masyarakat ada terdapat banyak kepentingan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Tetapi dipihak lain terdapat kepentingan bersama yaitu kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan aman dan damai tanpa adanya gangguan. Disinilah diperlukan suatu ”tata” (Orde/ Ordnung). ”Tata” itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia sehingga setiap kepentingan dapat terpelihara dan terjamin. ”Tata” (pedoman perilaku) itu lazim disebut Kaedah (Arab) atau norma(Latin) yang mempunyai 2 macam sisi yaitu :

a. Verboden/ verbod (Belanda) yang artinya larangan

b. Geboden/ Gebod (Belanda) yang artinya keharusan

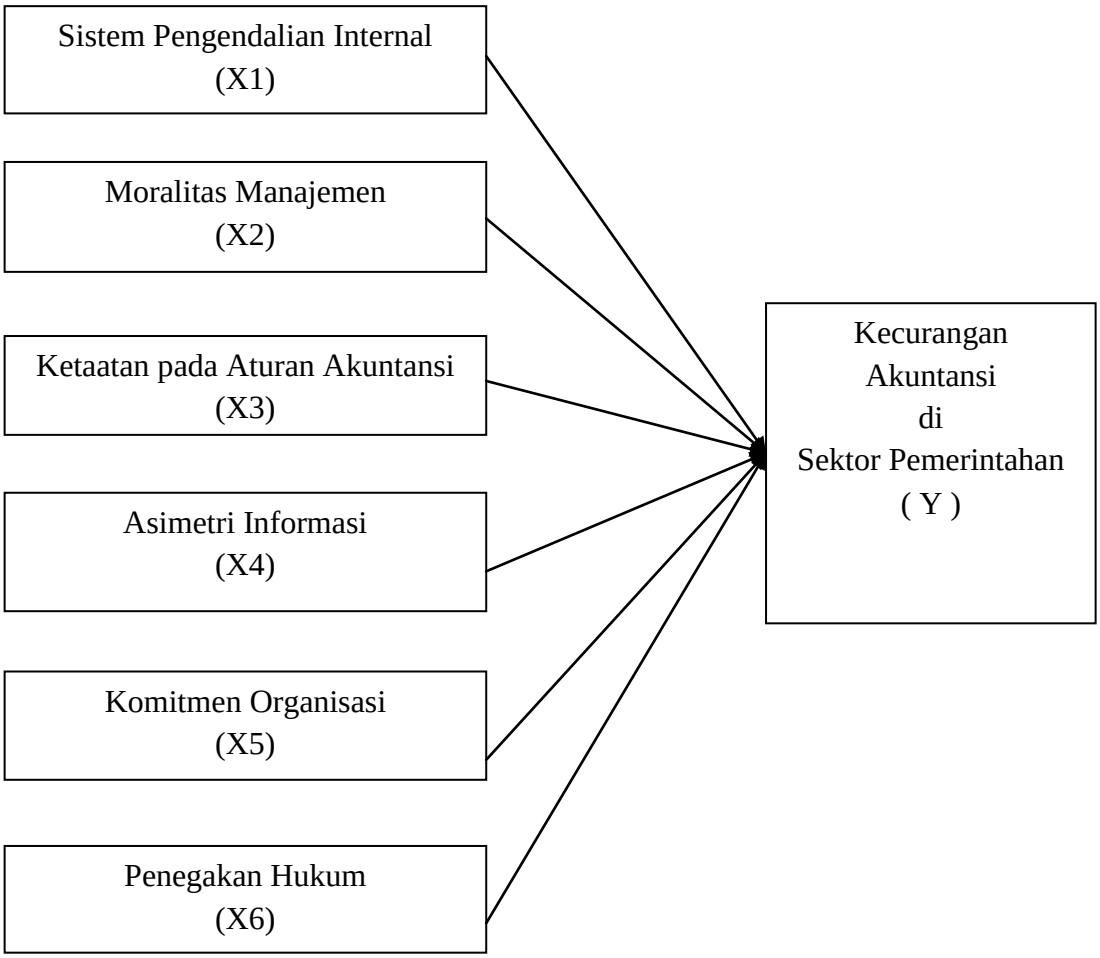
Norma/ pedoman perilaku hanya dapat dipertahankan dengan adanya sanksi, yaitu ancaman hukuman terhadap larangan. Inilah yang membedakan dengan norma-norma lainnya seperti norma kesusilaan, kebiasaan adat, agama dan lain-lain

Definisi hukum pada dasarnya adalah himpunan peraturan larangan dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Dalam kamus Bahasa Indonesia,

penegakan diartikan sebagai pelurusan, dari kata tegak yang artinya lurus. Sedangkan dalam kamus Bahasa Inggris disebut enforce yang artinya melaksanakan, memaksa, mendesak dan efforcement artinya pelaksanaan, pemaksaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah melaksanakan hukum baik dengan cara memaksakan maupun mendesak agar hukum itu dapat dijalankan secara lurus.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubunganhukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Pramudita,2013).

2.2 Kerangka Pemikiran



2.3 Perumusan Hipotesis

Pada hipotesis ini akan dipaparkan hubungan sistem pengendalian internal, moralitas manajemen, ketaatan pada aturan akuntansi, asimetri informasi, komitmen organisasi, dan penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, khususnya di sektor pemerintahan.

2.3.1 Hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen,dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturanyang berlaku (Faisal, 2013). Sistem Pengendalian Internal yang efektif dapat membantu pengurus menjaga aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kecurangan akuntansi, kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Penelitian Wilopo (2006) menemukan bahwa semakin baik dan semakin efektif suatu pengendalian internal maka akan semakin rendah tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Faisal (2013), Pramudita (2013), Zulkarnain (2013), Pristiyanti (2012) pun menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Wilopo (2006) yaitu berpengaruh signifikan dan negatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Wilopo (2006) bahwa adanya suatu sistem pengendalian internal bagi sebuah organisasi sangatlah penting, antara lain

untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan, sehingga fraud dapat ditekan dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengendalian internal di dalam suatu instansi akan semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan.

H1 : Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.3.2 Hubungan Moralitas Manajemen terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Moralitas manajemen merupakan tindakan manajemen untuk melakukan hal yang benar dan tidak berkaitan dengan keuntungan atau nilai. Menurut Wilopo (2006), semakin tinggi tahapan moralitas manajemen (tahapan postkonvensional), semakin manajemen memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan perusahaan semata, terlebih kepentingan pribadinya. Oleh karenanya, semakin tinggi moralitas manajemen, semakin manajemen berusaha menghindarkan diri dari kecenderungan kecurangan akuntansi. Manajemen dengan moral yang rendah tidak mempunyai kesadaran akan hal yang baik dan hal yang buruk sehingga sangat mudah untuk melakukan kecurangan akuntansi karena membenarkan perbuatan curang yang dilakukannya.

Dalam teori keagenan menyebutkan bahwa adanya perilaku dari manajer atau agen yang bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak lain/pemilik. Hal tersebut tidak sesuai dengan

kematangan moral manajemen yang menjadi indikasi pembuatan keputusan. Bernardi (1994) dalam Wilopo (2006) menjelaskan bahwa kematangan moral menjadi dasar dan pertimbangan manajemen dalam merancang tanggapan dan sikap terhadap isu-isu etis. Manajemen dengan moralitas yang tinggi tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan melakukan kecurangan akuntansi demi memaksimalkan keuntungan pribadi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kecurangan akuntansi dapat ditekan dengan adanya kematangan moral dari pihak manajemen.

Penelitian Wilopo (2006) telah meneliti pengaruh moralitas manajemen terhadap kecurangan akuntansi dan menunjukkan hasil bahwa moralitas berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecurangan akuntansi.

H2: Moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.3.3 Hubungan Ketaatan pada Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Perusahaan atau instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai aturan atau standar akuntansi yang berlaku kepada para pihak yang membutuhkan. Faktor-faktor yang mendorong perusahaan untuk menyediakan informasi laporan keuangan adalah kekuatan pasar serta kekuatan regulasi (Foster, 1986). Wilopo (2006) menyatakan bahwa regulasi mensyaratkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai aturan atau standar akuntansi kepada pihak yang membutuhkan. Namun, jika laporan akuntansi gagal karena ketidaktaatan penyusun terhadap aturan atau

standar akuntansi yang berlaku, maka akan menimbulkan kecurangan yang sulit dideteksi oleh auditor.

Menurut teori perkembangan moral Kohlberg (1969), moralitas manajemen yang tinggi juga didukung pada ketaatan pada aturan yang berlaku, termasuk aturan atau standar akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lainnya. Dalam teori tersebut pada tahap postkonvensional, manajemen berorientasi pada peraturan yang berlaku, sehingga ketaatan pada aturan akuntansi membentuk moralitas manajemen yang tinggi dan dapat menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen karena manajemen tidak mengutamakan kepentingan pribadinya. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegagalan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan manajemen karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi dapat menimbulkan kecurangan akuntansi oleh perusahaan untuk meraup keuntungan.

Wilopo (2006) meneliti pengaruh ketaatan pada aturan akuntansi dan menunjukkan hasil yang signifikan dan negatif, yang berarti semakin taat suatu pihak yang menyusun dan bertanggung jawab atas laporan keuangan terhadap aturan akuntansi, semakin rendah tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan.

H3 : Ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.3.4 Hubungan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Salah satu kendala yang muncul diantara principal dan agent adalah adanya asimetri informasi. Menurut Wilopo (2006), asimetri informasi adalah situasi di mana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi. Asimetri informasi tersebut timbul karena principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent dan agent memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan untuk menjadi peluang terjadinya kecurangan akuntansi. Peluang untuk melakukan kecurangan akuntansi akibat adanya asimetri informasi mendorong agent untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agent. Hal tersebut memacu agent untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya, contohnya menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi manajemen demi motivasi untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi, mempertahankan jabatan dan lain-lain, manajemen perusahaan juga memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat memperbaiki reputasi manajemen, serta rasio-rasio keuangan perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi asimetri informasi, maka semakin tinggi kecurangan yang dilakukan pihak manajemen perusahaan. Wilopo (2006) telah meneliti pengaruh asimetri informasi dan menunjukkan hasil signifikan positif.

H4 : Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.3.5 Hubungan Komitmen Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Komitmen organisasi adalah proses pada individu (pegawai) dalam mengidentifikasikan dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan organisasi (Pristiyanti, 2012). Valentine et al (2002) dalam Pristiyanti (2012) mengatakan bahwa lingkungan etis sangat berhubungan erat dengan komitmen organisasi. Dijelaskan lebih lanjut oleh Rae and Subramaniam(2008) bahwa dalam suatu lingkungan yang lebih etis, karyawan akan cenderung mengikuti peraturan perusahaan dan peraturan-peraturan tersebut akan menjadi perilaku secara moral. Komitmen organisasi secara umum mengacu pada sikap-sikap dan perasaan karyawan dihubungkan dengan nilai-nilai dan cara perusahaan itu melakukan berbagai hal (Rae and Subramaniam,2008). Dalam hal ini termasuk juga dalam melakukan tindak kecurangan. Apabila pegawai di suatu organisasi mempunyai komitmen organisasi yang tinggi terhadap organisasinya tersebut hal ini dapat menurunkan tingkat terjadinya Fraud di sektor pemerintahan. Maka semakin tinggi komitmen organisasi maka akan semakin rendah tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan. Penelitian Faisal (2013) dan Pristiyanti (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara komitmen organisasi dengan kecurangan akuntansi, yang berarti semakin tinggi komitmen organisasi maka kecenderungan kecurangan akuntansi semakin rendah. Sementara penelitian Pramudita (2013) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap fraud di sektor pemerintahan, yang berarti semakin tingi komitmen organisasi maka tidak dapat menekan tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan.

H5 : Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

2.3.6 Hubungan Penegakan Hukum terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Zulkarnain, 2013). Sistem hukum dapat menjadi fraud ketika adanya suatu tindakan atau kelalaian yang diperhitungkan akan mengakibatkan hilangnya sifat imparsial institusi. Secara khusus, korupsi terjadi manakala seorang pejabat institusi mencari atau menerima keuntungan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan kekuasaan atau tindakan lainnya. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa fraud sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi. Kepatuhan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada disuatu negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuhinya. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan timbul bila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi fraud disektor pemerintahan. Penelitian Faisal (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum dengan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan, yang berarti penegakan hukum yang baik dapat mengurangi tingkat kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan. Penelitian Pramudita (2013) dan Zulkarnain (2013) menunjukkan hasil yang sama, yaitu tidak terdapat pengaruh

antara penegakan hukum terhadap kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan, yang berarti semakin tinggi persepsi penegakan hukum di pemerintahan maka belum tentu dapat menekan tingkat terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan.

H6 : Penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah area Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Populasi tersebut dipilih karena Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah adalah Instansi Pemerintah yang bertugas membuat dan mengurus laporan keuangan di setiap daerah. Pemilihan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah karena peneliti berada di wilayah tersebut.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *convenience sampling,* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan. Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan pertimbangan staf dari bagian sekretariat di tiap Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah. Staf di bagian sekretariat mempertimbangkan siapa saja yang akan dipilih untuk mengisi kuisioner penelitian dengan membaca pertanyaan kuisioner terlebih dahulu.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui pemberian kuisioner kepada responden. Sumber data berasal dari pendapat dan persepsi staf di beberapa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah area Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel dependen

Variabel dependen disebut juga variabel tetap, merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecenderungan kecurangan akuntansi.

3.3.1.1 Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

IAI (2001) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai : (1) *Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan* yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan, (2) *Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva* (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kecenderungan kecurangan akuntansi terdiri dari lima item pertanyaan yang dikembangkan oleh peneliti dari SPAP, seksi 316 IAI (2001) dalam Wilopo (2006) dengan skala interval 4 poin.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen disebut juga variabel tidak tetap, merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal, moralitas manajemen, ketaatan pada aturan akutansi, asimetri informasi, komitmen organisasi, dan penegakan hukum.

3.3.2.1 Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen,dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi,kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Faisal, 2013).

Instrumen yang digunakan untuk mengukur keefektifan sistem pengendalian internal terdiri dari 5 item pertanyaan yang dikembangkan peneliti dari IAI (2001) dalam Wilopo (2006) perihal pengendalian internal yang diukur dengan skala interval 4 poin.

3.3.2.2 Moralitas Manajemen

Moralitas manajemen merupakan tindakan manajemen untuk melakukan hal yang benar dan tidak berkaitan dengan keuntungan atau nilai. Menurut Wilopo (2006), semakin tinggi tahapan moralitas manajemen (tahapan postkonvensional), semakin manajemen memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada kepentingan perusahaan semata, terlebih kepentingan pribadinya. Oleh karenanya, semakin tinggi moralitas manajemen, semakin manajemen berusaha menghindarkan diri dari kecenderungan kecurangan akuntansi.

Pengukuran moralitas manajemen berasal dari model pengukuran yang dikembangkan oleh Kohlberg (1969) dan Rest (1979) dalam Wilopo (2006). Moralitas manajemen diukur dengan enam item pertanyaan dengan skala interval 4 poin.

3.3.2.3 Ketaatan pada Aturan Akuntansi

Perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai aturan atau standar akuntansi yang berlaku kepada para pihak yang membutuhkan. Kegagalan penyusunan laporan keuangan disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, yang dapat menimbulkan kecurangan akuntansi oleh perusahaan untuk meraup keuntungan.

Ketaatan akuntansi diukur dengan 8 pertanyaan yang dikembangkan oleh peneliti dari IAI (1998) dalam Wilopo (2006) mengenai kode etik akuntan, yang diukur dengan skala interval 4 poin. Setiap instrumen pertanyaan mewakili sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur ketaatan aturan akuntansi. Indikator tersebut diantaranya mengenai tanggung jawab penerapan, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kehati-hatian, kerahasiaan, konsistensi, dan standar teknis.

3.3.2.4 Asimetri Informasi

Menurut Wilopo (2006), asimetri informasi adalah situasi di mana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi.

Asimetri informasi diukur dengan 6 pertanyaan yang dikembangkan oleh peneliti dari Dunk (1993) dalam Wilopo (2006) yang diukur dengan skala interval 4 poin. Setiap instrumen pertanyaan mewakili sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur asimetri informasi. Indikator tersebut diantaranya mengenai situasi dimana manajemen memiliki informasi yang lebih baik atas aktivitas

situasi dimana manajemen lebih mengenal hubungan *input-output,*situasi dimana manajemen lebih mengetahui potensi kinerja, situasi dimana manajemen lebih mengenal teknis pekerjaan, situasi dimana manajemen lebih mengetahui pengaruh faktor eksternal, dan situasi dimana manajemen lebih mengerti apa yang dapat dicapai dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar perusahaan.

3.3.2.5 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah proses pada individu (pegawai) dalam mengidentifikasikan dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan organisasi (Pristiyanti, 2012).

Komitmen organisasi diukur dengan instrumen yang digunakan oleh Mowday et Al (1979) dalam Wahyudin Nor (2004). Pengukuran dilakukan dengan 5 item pertanyaan dengan menggunakan skala interval 4 poin.

3.3.2.6 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Zulkarnain, 2013). Pengukuran penegakan hukum dilakukan dengan 5 item pertanyaan yang diukur dengan skala interval 4 poin.

3.4 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesa

3.4.1 Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis ini menggunakan regresi berganda dengan program SmartPLS 2.0 M3 Model persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_{1x1} + \beta_{2x2} + \beta_{3x3} + \beta_{4x4} + \beta_{5x5} + \beta_{6x6} + i \text{ .....}$$

Keterangan

Y : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

X1: Sistem Pengendalian Internal

X2 : Moralitas Manajemen

X3 : Ketaatan pada Aturan Akuntansi

X4 : Asimetri Informasi

X5 : Komitmen Organisasi

X6 : Penegakan Hukum

3.4.2 Pengujian Hipotesa

3.4.2.1 Sistem Pengendalian Internal

H_1 : Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

H_{o1} ; $\beta_1 \leq 0$: Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

H_1 ; $\beta_1 < 0$: Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

3.4.2.2 Moralitas Manajemen

H_2 : Moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

H_{o2} ; $\beta_2 \leq 0$: Moralitas manajemen tidak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

H_2 ; $\beta_2 < 0$: Moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

3.4.2.3 Ketaatan pada Aturan Akuntansi

H_3 : Ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

H_{o3} ; $\beta_3 \leq 0$: Ketaatan pada aturan akuntansi tidak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

H_3 ; $\beta_3 < 0$: Ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

3.4.2.4 Asimetri Informasi

H_4 : Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

H_{o4} ; $\beta_4 \leq 0$: Asimetri informasi tidak berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

H_4 ; $\beta_4 > 0$: Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

3.4.2.5 Komitmen Organisasi

H_5 : Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

H_{o5} ; $\beta_5 \leq 0$: Komitmen organisasi tidak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

H_5 ; $\beta_5 < 0$: Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

3.4.2.6 Penegakan Hukum

H_6 : Penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

H_{o6} ; $\beta_6 \leq 0$: Penegakan hukum tidak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

H_6 ; $\beta_6 < 0$: Penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

BAB 4

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Analisis Deskriptif

4.1.1 Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan 210 kuisioner dengan cara diberikan secara langsung ke instansi tempat responden bekerja yang berada di area Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Sebanyak 142 kuisioner diisi oleh pegawai dari berbagai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terletak di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Magelang. Namun sebanyak 17 kuisioner tidak dapat diikutsertakan karena pengisiannya yang tidak lengkap (gugur) sehingga kuisioner yang layak dianalisis sebanyak 125 kuisioner.

Ringkasan pengiriman dan pengembalian dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 1

Tabel 1.Rincian Penerimaan dan Pengembalian Kuesioner

Nama Instansi Pemerintah	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali	Kuesioner Tidak Layak
1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	30	26	4
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta	30	22	3
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman	30	18	2
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	30	21	2
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul	30	19	1
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kulonprogo	30	16	2
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Magelang	30	20	3
Jumlah	**210**	**142**	**125**

Sumber: Hasil Penelitian, 2013

Dari tabel 4.1.1 menunjukkan bahwa untuk pengiriman 210 kuesioner, yang kembali dan layak untuk dianalisis sebanyak 125 kuesioner, sehingga tingkat *response rate* adalah 59,52 %.

4.2 Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah staf instansi dari berbagai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terletak di DIY dan Kota Magelang. Gambaran umum dari 125 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 2 berikut

Tabel 2. Profil Responden (N=125)

Keterangan	Jumlah	Presentase
Gender		
Pria	71	57%
Wanita	54	43%
Pendidikan		
SMA	7	5,6%
D3	29	23,2%
S1	57	45,6%
S2	32	25,6%
Lama bekerja di Instansi		
< 5 tahun	22	17,6%
5-10 tahun	31	24,8%
> 10 tahun	72	57,6%

Sumber: Hasil Penelitian, 2013

4.3 Uji Kualitas Data

Uji validitas dan reabilitas dapat dilakukan untuk mengetahui evaluasi model pengukuran atau *outer model*. *Outer model* ini dapat dievaluasi melalui *substantive content*-nya yaitu dengan membandingkan besarnya *realtive weight* dan melihat signifikansi dari indikator konstruk tersebut (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2006). Selain melalui *substantive content*-nya, *outer model* juga dapat dievaluasi melalui nilai *cross loading*, nilai Average variance Extracted (AVE), dan nilai *composite reliability.*

Reabilitas merupakan ukuran konsistensi internal dan indikator sebuah konstruk yang menunjukkan derajat sampai mana masing-masing indikator mengindikasikan sebuah konstruk yang umum (Ferdinand, 2006).

Nilai batas yang digunakan untuk menilai tingkat reabilitas yang dapat diterima adalah 0,70. Sebuah konstruk bisa dikatakan reliabel apabila tingkat reabilitasnya sebesar 0,70 (Ferdinand, 2006). Hasil semua variabel reabilitasnya lebih dari 0,70 sehingga semua variabel dalam penelitian ini memenuhi uji reabilitas dapat dilihat di tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas Variabel Penelitian

Variabel	***Composite Reliability***
Sistem Pengendalian Internal	0,950
Moralitas Manajemen	0,930
Ketaatan pada Aturan Akuntansi	0,902
Asimetri Informasi	0,836
Komitmen Organisasi	0,904
Penegakan Hukum	0,927
Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	0,894

Sumber : Data diolah

Uji validitas adalah suatu uji yang bertujuan untuk menentukan kemampuan suatu indikator dalam mengukur konstruk (Ghozali, 2006). Validitas dapat ditentukan dengan melihat *relative weight (original sample estimate)* dan melihat T statistiknya. Untuk memenuhi uji validitas *original sample estimate* dari masing-masing konstruk indikator harus bernilai positif, sedangkan T statistik dapat dilihat dari *outer weight* (tabel 4 pada lampiran) dengan cara

membandingkan T statistik terhadap T tabel. Hasil uji validitas terhadap semua variabel menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dari setiap variabel valid, T statistik berkisar antara 2,163 - 21,964.

4.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan program SmartPLS 2.0 M3 melalui bootstrapping. Pengujian terhadap kelima hipotesis tersebut dengan melihat *Path Coefficients* nya. Apabila terdapat nilai positif di original sample maka ada hubungan positif begitu pula sebaliknya, apabila nilai negatif terdapat di original sample maka mempunyai hubungan negatif. Apabila T statistiknya > 1,65 maka ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya. Hasil *Path Coefficients* dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini

Tabel 5. *Result of Path Coefficients*

	Original Sample	**Sample Mean**	**Standard Deviation**	**Standard Error**	**T Statistics**
SPI -> KA	-0.146463	-0.130208	0.047369	0.047369	3.091938
MM -> KA	-0.305172	-0.315677	0.052598	0.052598	5.801943
AA-> KA	-0.266371	-0.257589	0.051015	0.051015	5.221382
AI -> KA	0.182178	0.185118	0.039777	0.039777	4.579983
KO -> KA	-0.277984	-0.277995	0.038075	0.038075	7.301052
PH -> KA	-0.243361	-0.253315	0.042322	0.042322	5.750281

Sumber : data diolah

4.4.1 Hipotesis 1 (H1)

Setelah dilakukan pengujian terhadap data, diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal (SPI) memiliki nilai T statistik diatas 1,65 yaitu sebesar 3.091938. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (KA). Nilai koefisien (*original sample)* negatif sebesar -0.146463. Hipotesis 1 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi terbukti karena memiliki t statistik diatas 1,65 yaitu sebesar 3.091938 yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden setuju dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif, maka kecurangan akuntansi dapat dihindari.

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen,dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Faisal, 2013).

Sistem pengendalian internal di sektor pemerintahan meningkat karena lingkungan pengendaliannya, apabila lingkungan pengendaliannya dapat menyadarkan semua pihak di instansi atau organisasi akan pentingnya proses pengendalian internal sehingga semua pihak di instansi dapat menyadari resiko atau ancaman yang akan timbul jika sistem pengendalian internal tidak efektif. Ketika semua pihak dapat menyadari resiko tersebut, maka kegiatan pengendalian

dapat berjalan dengan baik dan efektif, termasuk kegiatan pengkomunikasian informasi dan kegiatan pemantauan di suatu instansi atau organisasi.

Apabila sistem pengendalian internal efektif, maka dapat membantu pengurus dalam menjaga aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kecurangan akuntansi, kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Sistem pengendalian internal yang baik dan terus meningkat, maka dapat mengurangi fraud. Hal tersebut sesuai dengan logika hipotesa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, semakin meningkat sistem pengendalian internal maka kecurangan yang timbul akan semakin sedikit.

Sebaliknya apabila sistem pengendalian internal di suatu instansi lemah, maka tingkat kesadaran akan resiko atau ancaman yang berbahaya terhadap instansi akan berkurang sehingga semua pihak yang terlibat mengabaikan kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku sehingga tidak mendukung berjalannya kegiatan pengendalian internal. Kegiatan pengkomunikasian informasi pun tidak berjalan dengan lancar sehingga kegiatan pemantauan yang sangat penting tidak berjalan dengan baik, kemudian berdampak pada sistem pengendalian internal menjadi tidak efektif. Sistem pengendalian internal yang tidak efektif menyebabkan staf atau karyawan instansi cenderung mengabaikan hak dan kewajibannya terhadap kegiatan pengendalian internal dan situasi tersebut dapat menjadi peluang untuk melakukan kecurangan. Sistem pengendalian internal yang tidak efektif juga akan meningkatkan resiko pengendalian dalam

audit, resiko pengendalian adalah resiko bahwa suatu salah saji material yang terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal. Resiko pengendalian merupakan fungsi dari efektivitas sistem pengendalian internal. Hal tersebut sesuai dengan logika hipotesa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, semakin rendah sistem pengendalian internal maka semakin tinggi kecurangan yang dilakukan.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Faisal (2013), Pramudita (2013), Zulkarnain (2013), Pristiyanti (2012), dan Wilopo (2006) yaitu Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

4.4.2 Hipotesis 2 (H2)

Setelah dilakukan pengujian terhadap data, diperoleh hasil bahwa moralitas manajemen (MM) memiliki nilai T statistik diatas 1,65 yaitu sebesar 5.801943. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (KA). Nilai koefisien (*original sample)* negatif sebesar -0.305172. Hipotesis 2 menunjukkan bahwa moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi terbukti karena memiliki T statistik diatas 1,65 yaitu sebesar 5.801943. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa moralitas manajemen berpengaruh secara signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Moralitas manajemen merupakan tindakan manajemen untuk melakukan hal yang benar dan tidak berkaitan dengan keuntungan atau nilai.

Moralitas manajemen yang tinggi terbentuk melalui kematangan dan kesadaran moral dari manajemen itu sendiri yang berkembang melalui beberapa tahapan. Staf atau karyawan yang memiliki kematangan moral akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga mereka dapat menilai bahwa kecurangan akuntansi adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Kematangan moral akan menjadi dasar dalam berbagai hal yang dilakukan oleh instansi atau manajemen seperti melakukan pengambilan keputusan, pembuatan laporan keuangan, relasi dengan pihak luar, pembuatan kebijakan atau peraturan, menanggapi isu-isu etis dan lain-lain.

Kematangan moral akan meningkatkan moralitas manajemen. Semakin tinggi moralitas manajemen, semakin manajemen bersikap ke arah kebaikan dan positif dalam melakukan berbagai kegiatan di instansi atau perusahaan sehingga manajemen berusaha menghindarkan diri dari berbagai macam bentuk kecenderungan kecurangan akuntansi karena manajemen dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Manajemen dengan moralitas yang tinggi tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan melakukan kecurangan akuntansi demi memaksimalkan keuntungan pribadi. Hal tersebut sesuai dengan logika hipotesa bahwa moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, semakin tinggi moralitas manajemen, semakin rendah tingkat kecurangan yang dilakukan.

Sebaliknya dengan manajemen dengan moral yang rendah. Moralitas yang rendah juga terbentuk dari kesadaran pihak manajemen itu sendiri. Kesadaran moral yang rendah mengakibatkan manajemen tidak dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk sehingga membenarkan hal yang buruk. Hal yang buruk akan dianggap wajar oleh manajemen. Oleh karena itu manajemen melakukan kecurangan akuntansi karena membenarkan perbuatan curang yang dilakukannya sehingga melakukannya tanpa ada rasa bersalah, berbeda dengan manajemen yang mempunyai moralitas tinggi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kecurangan akuntansi meningkat karena rendahnya kesadaran moral dari manajemen yang sesuai dengan logika hipotesa yang menyatakan bahwa moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wilopo (2006) yang telah meneliti pengaruh moralitas manajemen terhadap kecurangan akuntansi dan menunjukkan hasil yang signifikan dan negatif.

4.4.3 Hipotesis 3 (H3)

Setelah dilakukan pengujian terhadap data, diperoleh hasil bahwa Ketaatan pada Aturan Akuntansi (AA) memiliki nilai T statistik diatas 1,65 yaitu sebesar 5.221382. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa Ketaatan pada Aturan Akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KA). Nilai koefisien (*original sample)* negatif sebesar -0.266371. Hipotesis 3 menunjukkan bahwa ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi terbukti karena memiliki T statistik diatas 1,65 yaitu sebesar 5.221382. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa

ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh secara signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Perusahaan maupun instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai aturan atau standar akuntansi yang berlaku kepada para pihak yang membutuhkan. Standar akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Ketaatan pada aturan akuntansi yang tinggi terbentuk melalui kepatuhan pembuat laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku, laporan keuangan yang disusun sesuai standar dapat memudahkan auditor dalam mendeteksi kecurangan karena auditor telah memahami standar akuntansi yang diterapkan. Hal tersebut mengakibatkan pembuat laporan keuangan takut melakukan kecurangan karena nantinya akan terdeteksi oleh auditor. Oleh karena itu, semakin tinggi ketaatan pada aturan akuntansi maka semakin rendah pula kecurangan akuntansinya, sesuai dengan logika hipotesa yang menyatakan bahwa ketaaatan pada aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Namun apabila penyusun laporan keuangan membuat laporan keuangan yang menyimpang dari peraturan dan standar yang ditetapkan, maka akan menimbulkan kecurangan yang sulit dideteksi oleh auditor. Penyusun laporan keuangan memanipulasi aturan dan standar resmi sedemikian rupa sehingga laporan keuangan disusun berdasarkan aturan dan ketentuannya sendiri, sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan resiko deteksi dalam audit. Resiko deteksi adalah resiko bahwa auditor gagal mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tidak taat suatu

pihak yang menyusun dan bertanggung jawab atas laporan keuangan terhadap aturan akuntansi, maka semakin tinggi tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Wilopo (2006) dengan hasil yang signifikan dan negatif.

4.4.4 Hipotesis 4 (H4)

Setelah dilakukan pengujian terhadap data, diperoleh hasil bahwa asimetri informasi (AI) memiliki nilai T statistik diatas 1,65 yaitu sebesar 4.579983. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa Asimetri Informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (KA). Nilai koefisien (*original sample)* positif sebesar 0.182178. Hipotesis 4 menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi terbukti karena memiliki T statistik diatas 1,65 yaitu sebesar 4.579983 yang menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Salah satu kendala yang muncul diantara principal dan agent adalah adanya asimetri informasi. Menurut Wilopo (2006), asimetri informasi adalah situasi di mana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi.

Asimetri informasi yang tinggi timbul karena principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent dan agent memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan atau instansi secara keseluruhan sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan untuk menjadi peluang terjadinya kecurangan akuntansi. Peluang untuk melakukan kecurangan akuntansi akibat adanya asimetri informasi

mendorong agent untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agent. Hal tersebut memacu agent untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya, contohnya menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat demi motivasi untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi, mempertahankan jabatan dan lain-lain, penyusun laporan keuangan di instansi juga memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat memperbaiki reputasi instansi tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi asimetri informasi, maka semakin tinggi kecurangan yang dilakukan pihak manajemen perusahaan atau instansi pemerintahan.

Sebaliknya apabila asimetri informasi di suatu instansi atau organisasi rendah, maka terbentuklah keselarasan informasi antara principal dan agen yang mengarah pada keseimbangan informasi. Principal mengetahui secara detail dan jelas mengenai kinerja dan keadaan agent sehingga agent sulit untuk membuat bias atau memanipulasi informasi. Maka semakin rendah asimetri informasi, semakin rendah pula kecurangan akuntansi yang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan logika hipotesa yang menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Wilopo (2006) yang telah meneliti pengaruh asimetri informasi dan menunjukkan hasil signifikan positif.

4.4.5 Hipotesis 5 (H5)

Setelah dilakukan pengujian terhadap data, diperoleh hasil bahwa komitmen organisasi (KO) memiliki nilai T statistik diatas 1,65 yaitu sebesar

7.301052 . Hal ini menunjukkan bahwa bahwa komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (KA). Nilai koefisien (*original sample)* negatif sebesar -0.277984 . Hipotesis 5 menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi terbukti karena memiliki T statistik diatas 1,65 yaitu sebesar 7.301052 yang menunjukkan bahwa ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa semakin tinggi komitmennya terhadap organisasi maka kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan akan semakin rendah.

Komitmen organisasi adalah proses pada individu (pegawai) dalam mengidentifikasikan dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan organisasi (Pristiyanti, 2012). Valentine et al (2002) dalam Pristiyanti (2012) mengatakan bahwa lingkungan etis sangat berhubungan erat dengan komitmen organisasi. Dijelaskan lebih lanjut oleh Rae and Subramaniam (2008) bahwa dalam suatu lingkungan yang lebih etis, karyawan akan cenderung mengikuti peraturan perusahaan dan peraturan-peraturan tersebut akan menjadi perilaku secara moral.

Komitmen organisasi secara umum mengacu pada sikap-sikap dan perasaan karyawan dihubungkan dengan nilai-nilai dan cara perusahaan itu melakukan berbagai hal (Rae and Subramaniam,2008). Dalam hal ini termasuk juga dalam melakukan tindak kecurangan.

Komitmen organisasi yang tinggi timbul karena semua pihak yang berada di organisasi menyatukan dirinya dengan organisasi, dengan memahami dan

menerapkan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan organisasi. Penyatuan diri dengan organisasi tersebut menciptakan suasana kerja yang profesional sehingga mencegah terjadinya kecurangan karena semua pihak di organisasi menyelaraskan dirinya untuk mencapai tujuan organisasi. Maka semakin tinggi komitmen organisasi maka akan semakin rendah tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan logika hipotesa yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Sebaliknya apabila komitmen organisasi rendah, maka semua pihak yang berada di organisasi tidak akan menyatukan dirinya dengan nilai-nilai organisasi sehingga mengabaikan tujuan organisasi. Keadaan tersebut akan mengakibatkan sulitnya mencapai situasi kerja yang profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga rawan terjadi kecurangan. Kecurangan terjadi karena pihak dalam organisasi tidak memperjuangkan kepentingan organisasinya, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Dapat disimpulkan bahwa semakin rendah komitmen organisasi, maka semakin tinggi kecurangan akuntansi yang dilakukan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Faisal (2013) dan Pristiyanti (2012) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara komitmen organisasi dengan kecurangan akuntansi, dan tidak sesuai dengan hasil penelitian Pramudita (2013) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap fraud di sektor pemerintahan.

4.4.6 Hipotesis 6 (H6)

Setelah dilakukan pengujian terhadap data, diperoleh hasil bahwa penegakan hukum (PH) memiliki nilai T statistik diatas 1,65 yaitu sebesar 5.750281. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa penegakan hukum berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (KA). Nilai koefisien (*original sample)* negatif sebesar -0.243361. Hipotesis 6 menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi terbukti karena memiliki T statistik diatas 1,65 yaitu sebesar 5.750281 yang menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Zulkarnain, 2013). Sistem hukum dapat menjadi fraud ketika adanya suatu tindakan atau kelalaian yang diperhitungkan akan mengakibatkan hilangnya sifat imparsial institusi.

Penegakan hukum yang baik timbul dari kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada disuatu negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak mematuhinya. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan timbul bila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi fraud di sektor pemerintahan.

Penegakan hukum yang rendah akan mengakibatkan subyek hukum tidak mentaati hukum yang berlaku dan tidak takut dengan hukum sehingga menyepelekan kesalahan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan logika hipotesa yang menyatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Faisal (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara penegakan hukum dengan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan, dan tidak sesuai dengan hasil Penelitian Pramudita (2013) dan Zulkarnain (2013) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara penegakan hukum terhadap kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal, moralitas manajemen, ketaatan pada aturan akuntansi, asimetri informasi, komitmen organisasi dan penegakan hukum terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi khususnya di sektor pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di berbagai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dan didukung oleh teori-teori yang melandasi serta hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan.

Pertama, sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu pengurus menjaga aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin efektif pengendalian internal di suatu instansi, maka semakin sedikit kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh pegawai.

Kedua, moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Apabila moralitas pegawai di instansi pemerintahan tinggi, maka pegawai semakin berusaha menghindarkan diri dari kecenderungan kecurangan akuntansi. Pegawai dengan moral yang rendah tidak mempunyai kesadaran akan hal yang baik dan hal yang buruk sehingga sangat mudah untuk melakukan kecurangan akuntansi karena membenarkan perbuatan curang yang

dilakukannya. Semakin tinggi tingkat moralitas pegawai, maka semakin rendah kecurangan akuntansi yang dilakukan.

Ketiga, ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Jika penyusun laporan keuangan di instansi pemerintahan menyusun sesuai dengan aturan dan standar akuntansi yang berlaku, maka akan semakin mudah auditor mendeteksi kecurangan yang dilakukan sehingga kecurangan akuntansi dapat dihindari. Semakin tinggi tingkat ketaatan pada aturan akuntansi, maka semakin rendah kecurangan yang dilakukan.

Keempat, asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Peluang untuk melakukan kecurangan akuntansi terjadi akibat adanya asimetri informasi yang mendorong agent untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agent. Semakin tinggi asimetri informasi di suatu instansi atau organisasi, maka semakin tinggi pula kecurangan akuntansi yang dilakukan.

Kelima, komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Apabila pegawai di suatu organisasi mempunyai komitmen organisasi yang tinggi terhadap organisasinya tersebut hal ini dapat menurunkan tingkat terjadinya Fraud di sektor pemerintahan. Maka semakin tinggi komitmen organisasi maka akan semakin rendah tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan.

Keenam, penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman

perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum. Semakin tinggi penegakan hukum yang dilakukan di suatu instansi atau organisasi, maka semakin rendah tingkat kecurangan akuntansi yang dilakukan karena pegawainya memiliki ketaatan hukum.

5.2 Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sistem pengendalian internal, moralitas manajemen, ketaatan pada aturan akuntansi, komitmen organisasi dan penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Maka terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan untuk dilakukan bagi pihak terkait.

a. Bagi Pemerintah

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadi suatu kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan. Temuan pertama menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Dari temuan tersebut, maka aparat pemerintah khususnya pihak pihak penting dalam suatu departemen atau instansi yang bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal instansinya harus bisa meyakinkan anggotanya untuk memahami pentingnya pelaksanaan sistem pengendalian internal, khususnya meningkatkan pemantauan terhadap keefektifan SPI.

Temuan kedua menyatakan bahwa moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Temuan tersebut menyadarkan

pemerintahan bahwa moral adalah kunci utama dari semua kinerja instansi pemerintahan. Pemerintah dapat meningkatkan moralitas aparatnya dengan siraman rohani ataupun pelatihan dan pembinaan moral karena moral adalah cerminan kinerja dari suatu instansi.

Temuan ketiga menyatakan bahwa ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Oleh karena itu, aparat pemerintah khususnya penyusun laporan keuangan pemerintahan, harus meningkatkan moralnya untuk mewujudkan kepatuhan terhadap aturan akuntansi karena kepatuhan sesungguhnya terbentuk dari kesadaran moral.

Temuan keempat menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini menjadi pekerjaan bagi aparat pemerintahan untuk lebih bekerja keras dalam menciptakan keseimbangan informasi, keseimbangan informasi dapat terbentuk dengan meningkatkan pemahaman dan transparansi untuk pihak yang membutuhkan informasi (masyarakat luar) terhadap pihak yang menyediakan informasi (instansi), contohnya dengan meningkatkan transparansi kinerja dan laporan keuangan pemerintah ke publik.

Temuan kelima menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi atau instansi pemerintahan harus mewujudkan situasi yang ideal dalam organisasi agar aparat pemerintah menyatukan dirinya dengan nilai-nilai organisasi atau instansi , contohnya dengan menyadarkan aparat mengenai

pentingnya komitmen organisasi terhadap kelangsungan karir atau kinerja karyawan.

Temuan yang terakhir menyatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Hal tersebut menyadarkan pemerintah akan hukum. Untuk pihak penegak hukum, diharapkan juga dapat lebih efektif dalam menyusun peraturan dan norma hukum sehingga ketaatan hukum di berbagai instansi benar-benar terwujud guna mengurangi tingkat kecurangan akuntansi yang dilakukan, misal dengan tidak menerima berbagai bentuk suap hukum dan memberikan sangsi yang berat dan tegas untuk pelaku kejahatan akuntansi. Dengan demikian, diharapkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintahan dapat ditekan.

Mengacu pada temuan-temuan tersebut, pemerintah diharapkan supaya lebih memahami faktor-faktor yang menyebabkan aparat atau pegawai di berbagai instansi melakukan kecurangan akuntansi sehingga kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan dapat diminimalisir mengingat maraknya korupsi atau kecurangan akuntansi yang terjadi di Indonesia saat ini.

b. Bagi Auditor

Temuan sistem pengendalian internal dan ketaatan pada aturan akuntansi menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut sama-sama berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sistem pengendalian internal dan ketaatan pada aturan akuntansi yang efektif pada instansi dapat mengurangi resiko audit. Penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor dalam meningkatkan kualitas audit khususnya audit di sektor pemerintahan. Auditor harus

mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penyusun laporan keuangan melakukan manipulasi atau kecurangan melalui identifikasi sistem pengendalian internal dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku, hal tersebut dapat memudahkan auditor dalam mengaudit dan memberikan opininya sehingga kecurangan akuntansi dapat terungkap.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Semua temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih berkembang dan variatif sehingga semakin banyak faktor-faktor lain yang dapat diidentifikasi dalam kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan. Kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan sangat penting untuk diteliti untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang bersih dan bebas dari korupsi.

d. Bagi Masyarakat

Temuan asimetri informasi menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dalam hal ini, masyarakat adalah sebagai pihak principal juga sebagaimana pemegang saham dalam suatu perusahaan. Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami kinerja keuangan aparat pemerintah dan menuntut transparansi laporan keuangan pemerintah sehingga aparat keuangan tidak membiaskan informasi keuangan yang dapat merugikan aset negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat secara umum untuk mengetahui lebih jauh mengenai berbagai kecurangan akuntansi yang terjadi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Terdapat keterbatasan yaitu pada pencarian sumber data dari penelitian ini hanya menggunakan kuisioner sehingga data yang diperoleh belum dapat menginterpretasikan secara keseluruhan, diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan metode yang lebih variatif seperti wawancara.

Selain itu, penelitian ini juga hanya dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah sehingga hanya menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan kedua wilayah tersebut. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukannya di wilayah lain yang lebih luas sehingga penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan benar-benar berkembang, mengingatnya pentingnya penelitian tersebut dalam kemajuan bangsa dalam memberantas korupsi dan kecurangan lainnya di sektor pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Faisal, Muhammad. *Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus*. 2013. Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang

Ferdinand, A. 2005. *Structural Equation Modelling dalam Penelitian Manajemen.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Geis, G., and R. F. Meier. 1977. *White-Collar Crime: Offenses in Business, Politics, and the Professions*. Revised Ed. New York: The Free Press.

Ghozali, I. 2006. *Structural Modelling Metode Alternatif Dengan Partial Least Square.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Jensen, and W. H. Meckling. *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. 1976. Journal of Financial Economics, vol. 3 : 305-360

Kohlberg, L. 1969. *Stage and sequence: The cognitive-development approach moral action to socialization*. In D. A. Goslin (Ed). Handbook of socialization theory and research (pp.347-480). Chicago: RandMcNally

Mulyadi. 2002. *Auditing* . Buku 1 Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.

Pramudita, Aditya. *Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kota Salatiga***.** 2013**.** Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang

Pristiyanti, Ika Ruly. *Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintahan*. 2012. Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang

Puspitadewi, Paramita dan Soni.*Hubungan Keadilan Organisasional Dan KecuranganPegawai Dengan Moderating KualitasPengendalian Internal*.2012. Indonesian Accounting Review

Putra , Yuniarti H.S. *Praktik Kecurangan Akuntansi Dalam Perusahaan*. 2010.Jurnal EL-MUHASABA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Rae and Subramaniam. *Quality Of Internal Control Procedures Antecedents And Moderating Effect On Organisational Justice And Employee Fraud*. *2008.* Managerial Auditing Journal Vol. 23 No. 2 pp. 104-124

Soselisa, Rangga dan Mukhlasin. *Pengaruh Faktor Kultur Organisasi, Manajemen, Strategik, Keuangan, Dan Auditor Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik di Indonesia*. 2012. Jurnal SNA 2012 Q2.

Sulistiyowati, Firma. *Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah tentang Tindak Korupsi*. 2007.Jurnal Ekonomi Universitas Sanata Dharma

Wilopo. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik Dan Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia*.2006. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.

Wilopo. *Pengaruh Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintah dan Perilaku Tidak Etis Birokrasi terhadap Kecurangan Akuntansi di Pemerintahan : Persepsi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan*. 2005.Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Ventura

Zulkarnain, Rifqi Mirza. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Pada Dinas Kota Surakarta*. 2013. Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang

LAMPIRAN

KUMPULAN TABEL

Tabel 1
Rincian Penerimaan dan Pengembalian Kuesioner

Nama Instansi Pemerintah	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali	Kuesioner Tidak Layak
1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	30	26	4
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta	30	22	3
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman	30	18	2
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	30	21	2
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul	30	19	1
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kulonprogo	30	16	2
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Magelang	30	20	3
Jumlah	**210**	**142**	**125**

Sumber: Hasil Penelitian, 2013

Tabel 2

Profil Responden (N=125)

Keterangan	Jumlah	Presentase
Gender		
Pria	71	57%
Wanita	54	43%
Pendidikan		
SMA	7	5,6%
D3	29	23,2%
S1	57	45,6%
S2	32	25,6%
Lama bekerja di Instansi		
< 5 tahun	22	17,6%
5-10 tahun	31	24,8%
> 10 tahun	72	57,6%

Sumber: Hasil Penelitian, 2013

Tabel 3

Hasil Uji Reabilitas Variabel Penelitian

Variabel	*Composite Reliability*
Sistem Pengendalian Internal	0,950
Moralitas Manajemen	0,930
Ketaatan pada Aturan Akuntansi	0,902
Asimetri Informasi	0,836
Komitmen Organisasi	0,904
Penegakan Hukum	0,927
Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	0,894

Sumber : Data diolah

Tabel 4. Hasil Outer Weight

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
x1.1 <- X1	0.243985	0.244131	0.011939	0.011939	20.435778
x1.2 <- X1	0.220683	0.220541	0.014299	0.014299	15.432948
x1.3 <- X1	0.207191	0.206158	0.011117	0.011117	18.637580
x1.4 <- X1	0.222289	0.222899	0.011886	0.011886	18.702238
x1.5 <- X1	0.227842	0.229767	0.011905	0.011905	19.137618
x2.1 <- X2	0.232642	0.232936	0.016962	0.016962	13.715820
x2.2 <- X2	0.226219	0.227257	0.018386	0.018386	12.303913
x2.3 <- X2	0.210014	0.209093	0.013105	0.013105	16.025534
x2.4 <- X2	0.221369	0.222134	0.016796	0.016796	13.179772
x2.5 <- X2	0.155600	0.154721	0.017101	0.017101	9.098955
x2.6 <- X2	0.143253	0.144261	0.022104	0.022104	6.480798
x3.1 <- X3	0.146737	0.143233	0.019368	0.019368	7.576111
x3.2 <- X3	0.142605	0.141036	0.022385	0.022385	6.370654
x3.3 <- X3	0.147762	0.142827	0.024012	0.024012	6.153796
x3.4 <- X3	0.182392	0.186277	0.023148	0.023148	7.879546
x3.5 <- X3	0.197826	0.199156	0.019357	0.019357	10.220119
x3.6 <- X3	0.172296	0.172533	0.018450	0.018450	9.338398
x3.7 <- X3	0.176884	0.178172	0.021746	0.021746	8.134253
x3.8 <- X3	0.191041	0.192980	0.020136	0.020136	9.487518
x4.1 <- X4	0.180701	0.177274	0.083510	0.083510	2.163819
x4.2 <- X4	0.205937	0.199852	0.068376	0.068376	3.011849
x4.3 <- X4	0.281010	0.281192	0.058114	0.058114	4.835501
x4.4 <- X4	0.362857	0.371005	0.066981	0.066981	5.417290
x4.5 <- X4	0.216638	0.209142	0.060379	0.060379	3.587966
x4.6 <- X4	0.190835	0.172094	0.066218	0.066218	2.881903
x5.1 <- X5	0.257151	0.254208	0.018756	0.018756	13.710440
x5.2 <- X5	0.236673	0.235185	0.016916	0.016916	13.991335
x5.3 <- X5	0.240038	0.241390	0.018397	0.018397	13.047804
x5.4 <- X5	0.238857	0.240269	0.022507	0.022507	10.612404
x5.5 <- X5	0.262723	0.261422	0.017585	0.017585	14.940241
x6.1 <- X6	0.258389	0.258324	0.024672	0.024672	10.472875
x6.2 <- X6	0.277767	0.278460	0.022977	0.022977	12.089063
x6.3 <- X6	0.225073	0.225091	0.018280	0.018280	12.312671
x6.4 <- X6	0.240178	0.239377	0.016962	0.016962	14.159343
x6.5 <- X6	0.170622	0.168002	0.029039	0.029039	5.875673
y1.1 <- Y	0.264703	0.263965	0.012287	0.012287	21.542781
y1.2 <- Y	0.232649	0.231250	0.014134	0.014134	16.460193
y1.3 <- Y	0.258617	0.260372	0.011774	0.011774	21.964222
y1.4 <- Y	0.276062	0.278548	0.013707	0.013707	20.140913
y1.5 <- Y	0.222292	0.221670	0.017045	0.017045	13.041378

Tabel 5

Result of Path Coefficients

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	Standard Error	T Statistics
SPI -> KA	-0.146463	-0.130208	0.047369	0.047369	3.091938
MM -> KA	-0.305172	-0.315677	0.052598	0.052598	5.801943
AA-> KA	-0.266371	-0.257589	0.051015	0.051015	5.221382
AI -> KA	0.182178	0.185118	0.039777	0.039777	4.579983
KO -> KA	-0.277984	-0.277995	0.038075	0.038075	7.301052
PH -> KA	-0.243361	-0.253315	0.042322	0.042322	5.750281

Sumber : data diolah

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 883087 - 885376 Fax. : 882589

Nomor : 275/DEK/10/Div.SDM/XI/2013 4 November 2013
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Kepada Yth.
Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah

Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Dini Nur Alifah
No. Mahasiswa : 10 312 414
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Jl.Kusuma Wijayakusuma 2 Perum Sidoarum Blok I Godean Sleman Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :
"Pengaruh Sistem Pengendalian Internal,Moralitas Manajemen,Ketaatan Pada Aturan Akuntansi,Asimetri Informasi,Komitmen Organisasi Dan Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di Sektor Pemerintahan "

Dosen Pembimbing : Prof Dr.Hadri Kusuma, MBA

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Dekan,

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA
NIK. 88 312 0104

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682
Fax (0274) 555241
EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3263
7687/34

Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Ekonomi - UII Yk
Nomor : 319/DEK/10/Div. SDM/XI/2013 Tanggal :29/11/2013

Mengingat :
1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Diijinkan Kepada :
Nama : DINI NUR ALIFAH NO MHS / NIM : 10312414
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - UII Yk
Alamat : Condong Catur Depok Sleman Yk
Penanggungjawab : Prof. Dr.Hadri Kusuma , MBA
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, MORALITAS MANAJEMEN, KETAATAN PADA ATURAN AKUNTANSI, ASIMETRI INFORMASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI DI SEKTOR PEMERINTAHAN

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 03/12/2013 Sampai 03/03/2014
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan :
1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 3-12-2013

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH
NIP. 196103031988032004

Tanda tangan
Pemegang Izin

: DINI NUR ALIFAH

Tembusan Kepada :
Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Bag P3ADK Setda Kota Yogyakarta
3. Dekan Fak. Ekonomi - UII Yk
4. Ybs.

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan No. 2 , Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: bpmpt.kulonprogokab.go.id Email : bpmpt@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00839/XII/2013

Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 070/Reg/V/12/2013, Tanggal: 03 DESEMBER 2013, Perihal: Izin Penelitian

Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu..

Diizinkan kepada	:	**DINI NUR ALIFAH**
NIM / NIP	:	**10312414**
PT/Instansi	:	**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**
Keperluan	:	**Izin Penelitian**
Judul/Tema	:	**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL MORALITAS MANAJEMEN KETAATAN PADA ATURAN AKUNTANSI, ASIMETRI INFORMASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI DISEKTOR PEMERINTAHAN**
Lokasi	:	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo
Waktu	:	03 Desember 2013 s/d 03 Januari 2014

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Ditetapkan di : **Wates**
Pada Tanggal : **18 Desember 2013**

KEPALA
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

Ir. Hj. NIKEN PRABO LARAS, S.Sos.,M.H
Pembina Tk.I ; IV/b
NIP. 19630801 199003 2 002

Tembusan kepada Yth. :
1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Kulon Progo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN
070 / **Reg** / V / **8274** / **12** / 2013

Membaca Surat : **Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta** Nomor : **319/DEK/10/DIV.SDM/XI/2013**
Tanggal : **29 November 2013** Perihal : **Izin Penelitian**

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/opengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **DINI NUR ALIFAH** NIP/NIM : **10 312 414**
Alamat : **Condongcatur, Depok, Sleman**
Judul : **PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, MORALITAS MANAJEMEN, KETAATAN PADA ATURAN AKUNTANSI, ASIMETRI INFORMASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI DI SEKTOR PEMERINTAHAN**
Lokasi : **Kab. Bantul dan Kab. Kulon Progo**
Waktu : **03 Desember 2013** s/d **03 Januari 2014**

Dengan Ketentuan:

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di sahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui *website* : adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **03 Desember 2013**

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pengembangan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETDA

Hendar Susilowati, SH.
NIP. 19580120 198503 2 003

Tembusan:
1. **Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)**
2. **Bupati Bantul CQ Ka. Bapeda**
3. **Bupati Kulon Progo cq KPT**
4. **Ka. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) DIY**
5. **Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**
6. **Yang Bersangkutan**

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Alamat : Jl. Brigjen. Katamso No.1 Wonosari Telp. 391942 Kode Pos : 55812

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 702/KPTS/XI/2013

Membaca	:	Surat dari Universitas Islam Indonesia, Nomor : 275/DEK/10/Div.SDM/XI/2013 , hal : Izin Penelitian
Mengingat	:	1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah; 2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri; 3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Diijinkan kepada	:	
Nama	:	**DINI NUR ALIFAH NIM : 10312414**
Fakultas/Instansi	:	Ekonomi / Universitas Islam Indonesia
Alamat Instansi	:	Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta
Alamat Rumah	:	Jl. Wijayakusuma 2 Perum Sidoarum Blok I Godean Sleman
Keperluan	:	Izin penelitian dengan judul "PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, MORALITAS MANAJEMEN, KETAATAN PADA ATURAN AKUNTANSI, ASIMETRI INFORMASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI DI SEKTOR PEMERINTAH"
Lokasi Penelitian	:	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul
Dosen Pembimbing	:	Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.
Waktunya	:	Mulai tanggal : 08/11/2013 sd. 30/11/2013
Dengan ketentuan	:	

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul).
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat menggangu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas. Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada Tanggal 08 November 2013
An. BUPATI GUNUNGKIDUL
KEPALA

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Drs. AZIS SALEH
NIP. 19660603 198602 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Kantor KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070/ Reg / 2721 / 2013

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/Reg/V/ 8274 /12 /2013

Tanggal : 03 Desember 2013 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat :

a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama	:	**Dini Nur Alifah**
P. T / Alamat	:	**Fak. Ekonomi UII Yogyakarta, Condongcatur Depok Sleman**
NIP/NIM/No. KTP	:	**10 312 414**
Tema/Judul Kegiatan	:	**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, MORALITAS MANAJEMEN, KETAATAN PADA ATURAN AKUNTANSI, ASIMETRI INFORMASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI DI SEKTOR PEMERINTAHAN**
Lokasi	:	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Waktu	:	05 Desember 2013 sd 03 Maret 2014

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 04Desember 2013

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data
Penelitian dan Pengembangan,
u.b. Kasubbid. Litbang

BAPPEDA
Heny Endrawati, S.P., M.P.
NIP: 19710608199803200 4

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1 Bupati Bantul (sebagai laporan)
2 Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3 Ka. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4 Dekan Fak. Ekonomi UII Yogyakarta
5 Yang Bersangkutan (Mahasiswa)

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
JLN KENARI NO. 56 TELP. 548519, 554080 FAXIMILE (0274) 554080
Y O G Y A K A R T A
KODE POS 55165
EMAIL INTERNET : dpdpk@.jogja.go.id; EMAIL INTRANET : dpdpk @intra.jogja.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 /4646 / DPDPK / XII /2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. WISNU BUDI IRIANTO,MSi

NIP : 19620404 199203 1003

Jabatan : Sekretaris DPDPK

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DINI NUR ALIFAH

NIM : 10312414

Pekerjaan : Mahasiswa Fak.Ekonomi – UII Yogyakarta

Alamat : Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta

Benar – benar telah melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Manajemen, Ketaatan pada Aturan Akuntansi,Asimetri Informasi,Komitmen Organisasi dan Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di Sektor Pemerintahan di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta pada tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan selesai .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya

Yogyakarta, 30 Desember 2013

a.n Kepala
Sekretaris

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Drs.Wisnu Budi Irianto,MSi
NIP.19620404 199203 1 003

SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Kepatihan Danurejan Telepon : 562811, Pesawat : 1117-1327, Faksimili : 564544
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070 /09135 / SET

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. ELISABETH ANI MARSIATI, M.Si.
NIP : 19631105 199003 2 007
Jabatan : Sekretaris DPPKA DIY

Dengan ini menerangkan :
Nama : DINI NUR ALIFAH
NIM : 10312414
mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tanggal 04 sampai dengan 28 November 2013, untuk kelengkapan Tugas Akhir.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 November 2013
A.n. Kepala,
Sekretaris,

Dra. E. ANI MARSIATI, M.Si.
NIP. 19631105 199003 2 007

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat: Jl.Parasamya No.06, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telpon (0274) 866039, 868405 Psw 281,372,Fax.(0274) 866039, Kode Pos 55511

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 073 / 152 /2013

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Dini Nur Alifah
No. Mahasiswa	:	10312414
Perguruan Tinggi	:	UII Yogyakarta
Alamat	:	Jl,Kusuma Wijayakusuma 2 Perum Sidoarum blok I Godean SlemanYogyakarta.

Telah mengadakan penelitian untuk kepentingan penyusunan karya tulis/skripsi dengan judul :
"**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Manajemen, Ketaatan Pada Aturan Akuntansi, Asimetri Informasi Dan Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di Sektor Pemerintah"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sleman, 12 Desember 2013
a/n Kepala DPKAD
Kab. Sleman

Drs. Suhardi
Ka.Sub.Bag. Perencanaan dan Evaluasi
Sekretariat DPKAD Kab. Sleman

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul, Telp./Fax (0274) 368548, Kode Pos 55711
Website http://dppkad.bantulkab.go.id Email: dppkad@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 127 .

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Ir. FENTY YUSDAYATI, M.T.
N I P	:	19670403 199403 2 008
Pangkat/Gol. Ruang	:	Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan	:	Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Dini Nur Alifah
N I M	:	10 312 414
Konsentrasi	:	Akuntansi
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Indonesia

Telah selesai melakukan penelitian di DPPKAD Kabupaten Bantul dengan judul penelitian Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Manajemen, Ketaatan Pada Aturan Akuntansi, Asimetri Informasi, Komitmen Organisasi Dan Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di Sektor Pemerintahan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bantul, 15 Januari 2014
KEPALA DINAS

Ir. FENTY YUSDAYATI, M.T.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19670403 199403 2 008

KUESIONER

KUISIONER

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Manajemen, Ketaatan pada Aturan Akuntansi, Asimetri Informasi, Komitmen Organisasi dan Penegakan Hukum terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Di Sektor Pemerintahan

Identitas Responden

1. Nomor Responden :……(diisi oleh peneliti)

2. Nama :…… (boleh tidak diisi)

3. Jenis Kelamin : ☐ laki-laki

☐ perempuan

4. Umur : ……..

5. Tingkat Pendidikan :

☐ SMA ☐ S1 ☐ S3

☐ D3 ☐ S2 ☐ lainnya

6. Jabatan : ……

7. Masa Kerja : ☐ <5 tahun ☐ 5-10 tahun ☐ >10 tahun

BAGIAN ISI PERTANYAAN

Petunjuk : mohon Bapak/Ibu memberi tanda *check list* (*V*) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan keadaan ditempat Bapak/Ibu bekerja Pilihan jawaban :

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Sistem Pengendalian Internal

No	Pernyataan	SS (sangat setuju)	S (setuju)	TS (tidak setuju)	STS (sangat tidak setuju)
1	Pada instansi pemerintah tempat saya bekerja, penerapan wewenang dan tanggung jawab tidak terlalu dipentingkan				
2	Pada instansi pemerintah tempat saya bekerja, bila laporan keuangan perlu segera diterbitkan, maka otorisasi transaksi dan bukti pendukung dapat diabaikan				
3	Pada instansi pemerintah tempat saya bekerja, pemeriksaan fisik atas kekayaan (kas, persediaan dan lain-lain) hanya dilakukan pada saat diperlukan				
4	Pada instansi pemerintah tempat saya bekerja, sistem akuntansi tidak dapat mencatat seluruh informasi kegiatan operasional dalam pemerintahan				
5	Pada instansi pemerintah tempat saya bekerja, pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional untuk menilai pelaksanaan pengendalian internal (misalnya, derajat keamanan kas, persediaan dsb) tidak dilakukan secara terus menerus				

Moralitas Manajemen

No	Pernyataan	SS (sangat setuju)	S (setuju)	TS (tidak setuju)	STS (sangat tidak setuju)
1.	Laporan keuangan harus direkayasa sehingga keuangan pemerintah terlihat dalam kondisi yang baik, karena bila menunjukkan laporan keuangan yang sebenarnya, akan diberhentikan bekerja pada instansi pemerintah ini				
2	Laporan keuangan harus direkayasa sehingga keuangan pemerintah terlihat dalam kondisi yang baik, karena bila menunjukkan laporan keuangan yang sebenarnya, tidak akan memperoleh bonus				
3	Laporan keuangan harus direkayasa sehingga keuangan pemerintah terlihat dalam kondisi yang baik untuk menjaga citra dan kinerja instansi pemerintah ini				
4	Laporan keuangan harus direkayasa sehingga keuangan pemerintah terlihat dalam kondisi yang baik karena hal tersebut sudah menjadi kelaziman				
5	Laporan Keuangan harus ditunjukkan apa adanya sesuai dengan kondisi pemerintahan yang sebenarnya, karena hal ini tidak akan merugikan pemerintah secara keseluruhan di masa depan, serta tidak akan terkena sanksi undang-undang				
6	Laporan Keuangan harus ditunjukkan apa adanya sesuai dengan kondisi pemerintahan yang sebenarnya demi mempertimbangkan prinsip kesejahteraan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan atas pemerintahan, serta tidak merugikan profesi secara keseluruhan				

Ketaatan pada Aturan Akuntansi

No	Pernyataan	SS (sangat setuju)	S (setuju)	TS (tidak setuju)	STS (sangat tidak setuju)
1	Adanya berbagai rintangan dan hambatan, menyebabkan penanggung jawab penyusunan laporan keuangan di instansi pemerintah ini tidak harus menggunakan pertimbangan moral dan profesi dalam mengerjakan laporan keuangan				
2	Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab penyusunan laporan keuangan di instansi pemerintah ini perlu mempertimbangkan kepentingan pengguna laporan keuangan sebagai skala prioritas				
3	Dalam menyusun laporan keuangan, sangatlah sulit bagi penanggung jawab penyusunan laporan keuangan di instansi pemerintah ini untuk mengungkapkan seluruh kejadian dan transaksi keuangan yang ada di pemerintahan				
4	Dalam menyusun laporan keuangan, penanggung jawab penyusunan laporan keuangan di instansi pemerintah ini harus berusaha membebaskan diri dari berbagai pengaruh kepentingan tertentu dari pihak lain yang bertentangan dengan ketentuan akuntansi				
5	Dalam menyusun laporan keuangan, penanggung jawab penyusunan laporan keuangan di instansi pemerintah ini perlu berusaha bertindak hati-hati yang didasarkan pada keahliannya				
6	Bila diminta sebagai saksi di di depan pengadilan, penanggung jawab penyusun laporan keuangan di instansi pemerintah ini wajib mengungkapkan rahasia dan kejadian dalam instansi pemerintah yang sebenarnya				
7	Bila mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab penyusunan laporan				

	di instansi pemerintah ini tidak harus menaati ketentuan akuntansi secara konsisten				
8	Dalam kenyataaanya bila menyusun laporan keuangan, penanggung jawab penyusunan laporan keuangan di instansi pemerintah ini tidak perlu menggunakan standar akuntansi keuangan				

Asimetri Informasi

No	Pernyataan	SS (sangat setuju)	S (setuju)	TS (tidak setuju)	STS (sangat tidak setuju)
1	Dalam instansi pemerintah ini, hanya penanggung jawab penyusunan laporan yang memahami seluruh hubungan antara data transaksi keuangan dengan proses penyusunan laporan keuangan				
2	Pada instansi pemerintahan ini, hanya penanggung jawab laporan keuangan yang mengerti liku-liku pembuatan laporan keuangan				
3	Atas pekerjaan di bidang akuntansi, pihak luar instansi pemerintah ini, baik langsung atau tidak langsung, juga mengetahui seluruh informasi yang berkaitan dengan transaksi yang mempunyai dampak keuangan				
4	Pihak luar instansi pemerintah ini, baik langsung atau tidak langsung, selalu mengetahui dan memahami isi dan angka laporan keuangan yang selesai dikerjakan				
5	Pihak luar instansi pemerintah ini, baik langsung atau tidak langsung juga mengetahui faktor yang mempengaruhi kegiatan pembuatan laporan				

	keuangan				
6	Pada instansi pemerintah ini, pihak luar instansi, baik langsung atau tidak langsung, tidak pernah mengetahui isi dan angka yang sebenarnya dari laporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintahan				

Komitmen Organisasi

No	Pernyataan	SS (sangat setuju)	S (setuju)	TS (tidak setuju)	STS (sangat tidak setuju)
1	Saya berkeinginan untuk memberikan segala upaya yang ada meskipun harus melakukan kecurangan untuk menjaga nama baik Instansi ini karena saya membanggakan Instansi ini				
2	Saya akan menerima hampir setiap jenis penugasan agar saya tetap bekerja di Instansi ini				
3	Saya menemukan bahwa sistem nilai (value) saya sama dengan sistem nilai (value) instansi ini				
4	Instansi ini memberikan peluang yang terbaik bagi saya dalam meningkatkan kinerja instansi ini				
5	Saya berkeinginan untuk memberikan segala upaya yang ada meskipun harus melakukan kecurangan untuk menjaga nama baik Instansi ini karena kepedulian saya terhadap masa depan instansi ini sangat besar				

Penegakan Hukum

No	Pernyataan	SS (sangat setuju)	S (setuju)	TS (tidak setuju)	STS (sangat tidak setuju)
1	Dalam melaksanakan pekerjaan saya, saya tidak boleh melakukan kecurangan akuntansi karena seseorang seharusnya patuh terhadap hukum atau peraturan yang berlaku				
2	Saya harus tunduk / patuh pada hukum meskipun menghalangi keinginan atau hak pribadi saya				
3	Kondisi pribadi (keterbatasan keuangan, kebutuhan yangmendesak) seharusnya tidak dijadikan alasan untuk melakukan kecurangan akuntansi karena hal tersebut melanggar hukum				
4	Saya melakukan kecurangan akuntansi karena penegakan hukum yang diterapkan di Instansi ini lemah				
5	Saya tahu perbuatan melakukan kecurangan akuntansi itu melanggar hukum, tapi tidak masalah selama tidak ketahuan				

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

No	Pernyataan	SS (sangat setuju)	S (setuju)	TS (tidak setuju)	STS (sangat tidak setuju)
1	Agar laba instansi pemerintah ini tampak lebih besar, maka wajar bila pimpinan bagian akuntansi di instansi pemerintahan ini memperkecil biaya-biaya yang tercatat dalam pembukuan				
2	Bagi pimpinan bagian akuntansi di instansi pemerintah ini, demi mengamankan posisi adalah wajar bila catatan dan dokumen penyuapan kepada pihak-pihak tertentu dihilangkan dari pembukuan				
3	Bila ingin menunjukkan pendapatan yang lebih besar dari yang sebenarnya, penanggung jawab penyusunan laporan pada instansi pemerintah ini diperkenankan untuk memperkecil cadangan piutang macet				
4	Pimpinan bagian akuntansi di instansi pemerintah ini, sepatutnya berusaha untuk tidak menerima berbagai pembayaran fiktif yang ada di instansi pemerintahan				
5	Jika seandainya kepala dinas ingin membeli rumah dinas dengan harga murah (dibawah harga pasar). Kepala bagian keuangan di instasi pemerintahan ini seharusnya berani menolak permintaan kepala dinas tersebut				

JAWABAN RESPONDEN

Jawaban X1 dan X2

x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	3
1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1
1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2
2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1
2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1
2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3
2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3
1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	3
1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	4
1	1	1	2	1	3	3	3	3	3	4
2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2
1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2
2	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3
1	1	2	3	2	1	1	1	1	2	2
2	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1
1	1	2	3	2	1	1	1	1	2	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	2	1	1	3	4	4	3	4	4
2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
2	1	2	1	3	2	1	2	2	2	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
1	1	2	1	2	1	1	1	1	3	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4
2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4
2	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3
2	1	2	1	1	1	1	1	1	3	4

x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6
1	1	2	1	2	1	1	2	1	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	1	3	3	3	3	4	4
2	1	2	1	2	2	2	1	1	2	2
1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	3
1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	2
2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
2	2	2	1	2	1	2	2	2	3	3
3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2
2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2
1	1	2	2	1	1	1	2	1	4	3
1	2	2	2	1	1	2	1	1	4	3
1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
2	2	2	1	2	1	1	1	2	3	3
2	2	1	1	1	1	1	2	2	3	4
1	1	1	2	2	2	2	1	1	4	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4
2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	4
4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3
4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4
1	1	2	2	1	2	1	1	2	4	3
2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2
1	1	2	1	2	2	2	2	1	4	3
2	1	2	1	1	1	1	1	2	4	3
2	2	2	2	1	2	2	2	1	4	3
1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	4
4	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3
2	1	2	1	2	1	2	2	2	4	3
2	2	2	1	1	2	2	2	2	4	3
1	1	2	1	1	2	2	2	1	3	4
1	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1
2	1	1	1	1	2	1	2	2	3	4
2	1	1	1	2	2	2	2	2	4	4
2	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3

x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6
1	1	2	3	3	1	1	1	2	3	3
1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4
1	1	2	2	1	2	2	1	1	4	3
1	2	2	2	1	1	1	2	2	4	4
2	2	1	1	2	2	2	2	2	4	3
2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	4
4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
2	2	1	1	2	2	2	2	2	3	4
1	1	1	2	1	2	1	2	1	3	3
1	2	1	2	1	2	2	2	1	3	3
2	2	1	1	2	2	2	2	2	3	3
1	1	2	1	2	1	2	2	1	4	3
1	2	2	2	1	1	2	2	2	4	4
1	1	1	2	2	2	2	2	1	3	4
2	2	2	1	1	2	2	1	1	3	4
1	2	2	2	2	2	1	1	2	4	3
2	2	2	1	1	1	1	2	2	3	3
2	2	2	2	1	1	2	1	2	4	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3
2	2	2	2	2	2	2	1	1	4	4
2	2	1	1	1	1	2	1	2	3	4
1	1	1	1	2	2	2	2	1	4	3
3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2
2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1
2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	2
2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	2
1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1
1	1	2	2	1	2	2	1	1	1	2
1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2
1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	2
2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2
2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1
2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2

X3 dan X4

x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3.5	x3.6	x3.7	x3.8	x4.1	x4.2	x4.3	x4.4	x4.5	x4.6
2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2
1	4	3	4	4	4	1	1	1	1	4	4	3	1
1	4	3	4	4	4	1	1	1	1	4	4	3	2
1	3	2	3	3	3	1	1	1	2	3	3	3	2
2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2
2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2
1	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2
3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2
3	3	3	3	3	3	2	4	3	2	3	3	4	3
2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2
3	3	3	4	4	3	3	3	1	1	4	4	4	1
1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	4	4	4	1
2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
1	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	3	2
4	4	3	3	4	3	2	2	2	2	3	3	3	2
3	3	3	3	4	3	2	2	2	2	1	2	2	3
4	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2
2	3	3	3	4	3	2	2	2	2	1	2	2	3
2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2
2	3	2	3	3	2	1	1	3	3	2	3	2	2
3	2	2	2	3	3	3	1	2	2	2	2	2	3
2	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2
2	3	2	3	3	2	2	2	1	1	3	3	3	2
2	3	2	3	3	2	2	2	1	1	3	3	3	2
1	4	3	4	4	2	2	1	2	2	3	2	3	2
2	4	2	3	3	3	2	2	1	1	3	2	3	2
3	3	1	4	4	4	2	2	1	2	3	3	3	2
3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2
1	2	1	4	4	4	2	1	1	2	3	3	2	2
3	3	2	4	4	3	1	2	2	2	3	3	3	1
2	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2
3	4	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3
3	4	3	4	4	3	3	3	1	1	1	1	2	1
3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2
3	3	2	1	4	3	2	1	2	2	2	2	2	3

x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3.5	x3.6	x3.7	x3.8	x4.1	x4.2	x4.3	x4.4	x4.5	x4.6
2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3
2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	3	3	2
3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	1	3	1
3	3	3	3	3	3	1	1	1	2	3	2	4	2
3	3	3	4	3	4	2	1	1	2	4	2	4	1
3	3	3	4	3	4	2	2	1	1	4	2	3	1
3	4	3	3	4	4	1	2	1	2	3	2	4	2
3	4	3	4	4	4	1	1	2	2	2	1	1	2
3	4	3	3	3	3	1	2	2	1	3	2	3	2
4	3	3	4	4	4	2	2	2	2	2	1	2	1
3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	2	3	2
2	4	3	3	4	3	2	1	2	2	4	1	4	1
4	3	3	3	4	4	1	2	1	2	3	1	4	2
2	3	3	3	4	4	1	1	2	1	1	1	1	1
4	4	4	4	3	3	2	2	1	1	3	2	3	1
2	3	1	4	3	4	3	3	2	2	1	1	2	2
1	4	2	3	4	3	2	2	1	2	3	2	3	2
2	3	1	4	3	3	2	2	1	1	4	1	4	2
2	4	2	3	4	4	2	2	2	2	3	2	3	1
1	2	2	2	2	2	2	1	4	4	4	4	4	2
3	4	3	4	4	3	3	3	2	2	3	2	3	2
2	4	3	3	3	4	4	3	1	1	2	1	2	1
3	3	3	4	4	3	4	3	2	2	2	2	2	2
4	4	3	3	4	4	4	3	1	1	2	1	2	1
3	3	3	4	4	4	3	3	2	1	2	2	2	2
3	4	3	3	3	3	1	2	4	4	4	4	4	4
3	3	4	4	3	4	2	1	2	2	3	2	3	2
4	4	4	4	4	4	3	4	1	2	3	1	3	2
1	4	2	4	4	3	2	2	2	1	3	3	3	2
2	4	1	4	4	4	2	1	1	2	3	1	3	1
2	3	1	3	3	4	1	2	2	2	2	2	2	2
2	4	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	4	2	3	4	4	3	3	1	2	3	2	4	1
3	3	3	3	4	3	3	3	2	1	1	1	1	1
2	3	2	3	3	4	2	2	3	3	3	2	3	3
1	4	1	4	4	3	1	1	2	2	2	2	2	2
2	4	2	3	3	4	2	2	1	1	1	2	1	2
1	2	1	2	2	2	2	1	4	3	4	4	4	3
2	3	1	3	3	4	1	2	1	2	3	2	3	2
4	3	2	4	4	4	4	3	2	1	3	2	4	2
4	4	1	3	3	3	1	2	1	2	3	2	3	1

x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3.5	x3.6	x3.7	x3.8	x4.1	x4.2	x4.3	x4.4	x4.5	x4.6
4	3	2	4	3	4	2	1	3	3	2	3	2	2
3	3	2	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
4	3	2	4	4	3	2	2	2	1	2	1	2	1
3	4	1	3	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2
4	4	2	4	4	4	1	1	1	1	2	1	2	2
3	4	1	4	3	3	1	1	1	2	2	1	2	2
4	3	4	4	4	4	4	4	1	2	2	2	2	2
4	4	2	3	3	3	1	2	1	1	2	1	2	1
3	4	1	4	4	4	2	1	2	2	2	2	2	2
3	3	2	3	3	3	1	2	2	1	2	2	2	2
3	3	2	4	4	4	2	1	1	1	2	1	2	1
4	3	1	4	3	3	1	2	2	2	2	2	3	2
3	4	2	3	4	3	2	2	4	3	3	3	3	3
3	3	2	4	4	3	1	1	3	3	3	3	3	3
3	4	1	4	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2
4	3	2	4	4	3	1	2	2	1	4	1	4	1
3	4	2	4	3	3	2	2	1	2	3	2	3	2
4	3	1	3	4	3	1	1	2	1	4	1	4	1
4	4	4	4	4	4	4	4	1	2	3	2	3	2
4	4	4	3	4	4	4	4	2	2	4	1	4	2
2	4	1	4	3	4	2	2	2	2	3	2	3	1
2	3	2	3	4	4	2	2	2	1	3	1	3	2
1	4	2	4	3	4	4	4	1	2	3	2	3	2
4	4	3	3	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2
1	3	2	4	3	4	4	4	1	1	3	1	3	1
2	4	1	3	4	4	4	3	2	2	3	2	4	1
1	4	2	3	4	3	3	3	1	1	3	2	4	2
2	3	2	3	4	4	3	3	2	2	4	1	3	2
2	3	2	4	3	3	2	2	2	1	3	2	4	2
2	4	1	4	4	4	4	3	1	2	4	2	4	1
1	4	2	3	3	3	2	3	2	2	3	1	3	2
2	4	1	4	3	4	3	3	1	2	3	2	4	1
1	3	2	3	3	3	2	1	2	1	3	1	3	2
2	3	2	4	4	4	3	4	1	1	1	1	1	1
1	3	1	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4	3	1	1	1	1	2	1
2	4	2	3	3	3	3	3	3	2	4	2	3	2
2	3	3	4	4	4	3	3	1	2	3	1	2	2
1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	2	4	1
4	4	3	4	3	3	4	4	2	2	4	1	4	2

x5.1	x5.2	x5.3	x5.4	x5.5	x6.1	x6.2	x6.3	x6.4	x6.5	y1.1	y1.2	y1.3	y1.4	y1.5
2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3
2	2	2	2	2	3	3	4	4	3	3	3	2	2	2
1	1	3	3	1	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3
2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3
1	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3
1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	3	3	3	3	3
1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	3	3	3	3
2	1	1	1	1	2	2	2	1	2	3	3	3	3	3
2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
2	2	3	3	1	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2
2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2
2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3
2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	2	3	3	3
1	2	2	2	1	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2
3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	3	2	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2
3	2	3	3	2	3	2	3	2	2	3	3	2	2	2
2	2	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2
2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
2	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3	2	2	3	2
2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2
2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2
2	2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3
2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	1	2
2	3	3	4	2	4	4	4	4	4	3	2	2	2	3
1	3	3	4	2	4	4	4	4	4	2	3	2	2	2
2	3	3	3	2	3	3	3	4	4	2	2	2	2	2
3	3	3	4	3	2	2	2	1	1	3	3	3	3	2
3	2	3	3	3	4	4	4	4	4	2	3	2	2	2
3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1
1	3	4	3	2	4	3	3	3	3	2	3	2	2	2
2	3	2	3	2	4	3	3	3	3	2	3	3	3	2

x5.1	x5.2	x5.3	x5.4	x5.5	x6.1	x6.2	x6.3	x6.4	x6.5	y1.1	y1.2	y1.3	y1.4	y1.5
2	2	3	3	2	2	2	3	1	1	3	3	3	3	3
2	2	2	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3
2	2	3	3	1	3	3	4	3	4	2	2	2	2	3
3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	2	2	2	2	2
4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	2	2	2	2	3
3	3	4	4	2	4	3	3	3	3	2	2	2	2	3
2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	2	2	2	2	2
2	2	2	2	1	4	3	3	2	2	2	2	3	3	3
1	1	2	2	2	4	3	4	4	3	2	2	2	2	2
2	2	2	2	1	3	4	3	3	4	3	2	3	3	3
2	1	4	3	2	4	4	4	3	3	3	2	2	2	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2
2	2	2	2	2	4	4	4	4	3	3	2	2	2	2
1	1	1	1	1	3	3	3	2	1	3	2	3	3	3
3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2
2	1	1	2	1	2	2	2	1	2	3	3	3	3	3
1	2	2	2	2	4	4	4	3	3	3	3	2	2	3
2	2	2	2	1	2	3	3	2	2	3	3	2	3	2
1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	4	4	3	3	3
3	3	3	4	4	3	4	3	2	2	2	2	2	2	2
3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	1	2	1	1	2
3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	2	2	1	1	1
4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	1	1	1	1	1
4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	1	2	2	1	1
1	2	2	2	1	2	2	1	2	1	3	3	3	3	3
2	1	4	4	4	3	3	4	3	3	2	2	2	2	2
3	3	3	4	2	4	4	3	3	3	1	2	2	1	2
3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2
3	3	4	4	3	1	2	2	1	1	3	3	2	2	2
3	3	3	2	3	2	2	1	1	2	3	3	3	3	2
3	3	4	3	3	3	4	3	2	1	3	2	2	3	3
2	2	4	3	3	2	2	2	1	2	3	3	2	3	2
4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	2	2	1	2	1
3	3	3	4	3	2	2	2	1	2	3	3	3	3	2
4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	2	2	2	2	2
3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2
2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	4	3	3	3	3
1	2	2	2	3	4	4	4	4	3	2	3	2	2	2
2	1	3	3	3	3	3	3	2	1	2	3	2	2	2
1	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2	3	3	3	3

x5.1	x5.2	x5.3	x5.4	x5.5	x6.1	x6.2	x6.3	x6.4	x6.5	y1.1	y1.2	y1.3	y1.4	y1.5
1	2	1	1	1	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2
2	2	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	2	2	2
2	2	2	3	3	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2
3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2
2	2	4	4	3	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
2	1	2	2	2	4	3	4	4	3	2	3	2	2	2
3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	1	2	2	1	1
2	2	4	3	3	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2
1	1	3	3	2	4	4	4	2	2	3	3	2	2	2
2	2	4	3	3	3	4	4	1	2	3	2	2	3	2
1	2	4	4	4	4	3	3	2	3	2	2	2	2	2
2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	2	2	2
2	1	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
1	2	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	2	2	2
2	2	3	3	3	2	2	2	1	1	2	3	2	3	3
1	2	4	4	3	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2
2	1	2	2	2	3	3	3	4	3	2	3	2	2	3
3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2
3	3	3	4	3	3	3	3	2	1	2	2	2	2	2
3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	2	2	2	2	2
4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	2	2	2	2	2
4	4	4	4	3	3	4	3	2	1	2	2	2	2	3
3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	2	2	2	2	2
4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	1	2	2	2	2
4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	2	2	2	2	3
4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	3	2	2	2
3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
2	2	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	2	2	2
4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2
3	3	4	3	4	3	3	2	2	2	2	3	2	2	3
3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	2
4	4	4	3	4	3	4	3	2	2	2	2	2	2	3
3	4	3	4	3	4	3	4	2	2	3	2	2	2	3
3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	2	2	2	2
4	4	3	4	4	4	4	4	2	1	2	2	2	2	2
4	4	4	3	3	4	4	3	2	2	1	1	1	1	2
2	2	4	3	3	3	3	4	1	1	3	3	2	3	3
2	1	3	4	4	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2
1	2	4	3	3	4	4	4	2	2	3	3	2	3	3
2	1	3	4	3	3	3	4	2	1	2	3	2	2	3

HASIL DAN GAMBAR PENELITIAN DENGAN MENGGUNAKAN PLS

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (|O/STERR|)
X1 -> Y	-0.146463	-0.130208	0.047369	0.047369	3.091938
X2 -> Y	-0.305172	-0.315677	0.052598	0.052598	5.801943
X3 -> Y	-0.266371	-0.257589	0.051015	0.051015	5.221382
X4 -> Y	0.182178	0.185118	0.039777	0.039777	4.579983
X5 -> Y	-0.277984	-0.277995	0.038075	0.038075	7.301052
X6 -> Y	-0.243361	-0.253315	0.042322	0.042322	5.750281

Table of contents

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (|O/STERR|)
x1.1 <- X1	0.918083	0.915718	0.017404	0.017404	52.750944
x1.2 <- X1	0.900307	0.899752	0.020673	0.020673	43.550116
x1.3 <- X1	0.889219	0.886638	0.022434	0.022434	39.637082
x1.4 <- X1	0.868973	0.867973	0.025731	0.025731	33.771348
x1.5 <- X1	0.877439	0.877820	0.022181	0.022181	39.557502
x2.1 <- X2	0.868587	0.867781	0.021960	0.021960	39.553716
x2.2 <- X2	0.879314	0.877578	0.024931	0.024931	35.270537
x2.3 <- X2	0.906482	0.904659	0.018311	0.018311	49.504564
x2.4 <- X2	0.849148	0.846070	0.029203	0.029203	29.077427
x2.5 <- X2	0.738934	0.735800	0.045299	0.045299	16.312248
x2.6 <- X2	0.737754	0.736532	0.049614	0.049614	14.869977
x3.1 <- X3	0.659029	0.654859	0.064227	0.064227	10.260931
x3.2 <- X3	0.704190	0.697305	0.059967	0.059967	11.742908
x3.3 <- X3	0.689764	0.680365	0.059556	0.059556	11.581796
x3.4 <- X3	0.773000	0.775351	0.045330	0.045330	17.052792
x3.5 <- X3	0.789762	0.788710	0.043132	0.043132	18.310399
x3.6 <- X3	0.793214	0.790343	0.041766	0.041766	18.991652
x3.7 <- X3	0.703050	0.707448	0.043345	0.043345	16.219685
x3.8 <- X3	0.746975	0.745178	0.044942	0.044942	16.620772
x4.1 <- X4	0.554893	0.530055	0.179332	0.179332	3.094223
x4.2 <- X4	0.661062	0.628576	0.155973	0.155973	4.238314
x4.3 <- X4	0.699187	0.696778	0.089503	0.089503	7.811919
x4.4 <- X4	0.815681	0.813914	0.037385	0.037385	21.818357
x4.5 <- X4	0.701760	0.690898	0.083633	0.083633	8.390976
x4.6 <- X4	0.624164	0.585379	0.135461	0.135461	4.607694
x5.1 <- X5	0.808162	0.806333	0.036806	0.036806	21.957626
x5.2 <- X5	0.787597	0.792366	0.036837	0.036837	21.380869

x5.3 <- X5	0.816287	0.817388	0.030926	0.030926	26.394583
x5.4 <- X5	0.809422	0.813769	0.034377	0.034377	23.545152
x5.5 <- X5	0.824068	0.821671	0.031267	0.031267	26.355898
x6.1 <- X6	0.871282	0.871486	0.021975	0.021975	39.647911
x6.2 <- X6	0.872890	0.873492	0.023210	0.023210	37.608732
x6.3 <- X6	0.869495	0.872294	0.025868	0.025868	33.612882
x6.4 <- X6	0.858158	0.859051	0.030089	0.030089	28.520416
x6.5 <- X6	0.765435	0.761508	0.047722	0.047722	16.039344
y1.1 <- Y	0.807796	0.804684	0.038286	0.038286	21.098878
y1.2 <- Y	0.684450	0.679867	0.057114	0.057114	11.984028
y1.3 <- Y	0.851702	0.852116	0.023068	0.023068	36.921475
y1.4 <- Y	0.895169	0.898074	0.015305	0.015305	58.487035
y1.5 <- Y	0.717751	0.709449	0.058693	0.058693	12.228987

Table of contents

Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (|O/STERR|)
x1.1 <- X1	0.243985	0.244131	0.011939	0.011939	20.435778
x1.2 <- X1	0.220683	0.220541	0.014299	0.014299	15.432948
x1.3 <- X1	0.207191	0.206158	0.011117	0.011117	18.637580
x1.4 <- X1	0.222289	0.222899	0.011886	0.011886	18.702238
x1.5 <- X1	0.227842	0.229767	0.011905	0.011905	19.137618
x2.1 <- X2	0.232642	0.232936	0.016962	0.016962	13.715820
x2.2 <- X2	0.226219	0.227257	0.018386	0.018386	12.303913
x2.3 <- X2	0.210014	0.209093	0.013105	0.013105	16.025534
x2.4 <- X2	0.221369	0.222134	0.016796	0.016796	13.179772
x2.5 <- X2	0.155600	0.154721	0.017101	0.017101	9.098955
x2.6 <- X2	0.143253	0.144261	0.022104	0.022104	6.480798
x3.1 <- X3	0.146737	0.143233	0.019368	0.019368	7.576111
x3.2 <- X3	0.142605	0.141036	0.022385	0.022385	6.370654
x3.3 <- X3	0.147762	0.142827	0.024012	0.024012	6.153796
x3.4 <- X3	0.182392	0.186277	0.023148	0.023148	7.879546
x3.5 <- X3	0.197826	0.199156	0.019357	0.019357	10.220119
x3.6 <- X3	0.172296	0.172533	0.018450	0.018450	9.338398
x3.7 <- X3	0.176884	0.178172	0.021746	0.021746	8.134253
x3.8 <- X3	0.191041	0.192980	0.020136	0.020136	9.487518
x4.1 <- X4	0.180701	0.177274	0.083510	0.083510	2.163819
x4.2 <- X4	0.205937	0.199852	0.068376	0.068376	3.011849
x4.3 <- X4	0.281010	0.281192	0.058114	0.058114	4.835501
x4.4 <- X4	0.362857	0.371005	0.066981	0.066981	5.417290
x4.5 <- X4	0.216638	0.209142	0.060379	0.060379	3.587966
x4.6 <- X4	0.190835	0.172094	0.066218	0.066218	2.881903

x5.1 <- X5	0.257151	0.254208	0.018756	0.018756	13.710440
x5.2 <- X5	0.236673	0.235185	0.016916	0.016916	13.991335
x5.3 <- X5	0.240038	0.241390	0.018397	0.018397	13.047804
x5.4 <- X5	0.238857	0.240269	0.022507	0.022507	10.612404
x5.5 <- X5	0.262723	0.261422	0.017585	0.017585	14.940241
x6.1 <- X6	0.258389	0.258324	0.024672	0.024672	10.472875
x6.2 <- X6	0.277767	0.278460	0.022977	0.022977	12.089063
x6.3 <- X6	0.225073	0.225091	0.018280	0.018280	12.312671
x6.4 <- X6	0.240178	0.239377	0.016962	0.016962	14.159343
x6.5 <- X6	0.170622	0.168002	0.029039	0.029039	5.875673
y1.1 <- Y	0.264703	0.263965	0.012287	0.012287	21.542781
y1.2 <- Y	0.232649	0.231250	0.014134	0.014134	16.460193
y1.3 <- Y	0.258617	0.260372	0.011774	0.011774	21.964222
y1.4 <- Y	0.276062	0.278548	0.013707	0.013707	20.140913
y1.5 <- Y	0.222292	0.221670	0.017045	0.017045	13.041378

Table of contents

Structural Model Specification

PLS

Quality Criteria

Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
X1	0.793830	0.950604		0.935004	0.793830	
X2	0.693450	0.930962		0.911606	0.693450	
X3	0.538584	0.902908		0.877043	0.538583	
X4	0.463526	0.836408		0.770309	0.463525	
X5	0.654803	0.904601		0.868207	0.654803	
X6	0.719883	0.927637		0.903024	0.719883	
Y	0.632579	0.894986	0.864829	0.851182	0.632579	0.115303

Table of contents

Redundancy

	redundancy
X1	
X2	
X3	
X4	
X5	
X6	
Y	0.115303

Table of contents

Cronbachs Alpha

	Cronbachs Alpha
X1	0.935004
X2	0.911606
X3	0.877043
X4	0.770309
X5	0.868207
X6	0.903024
Y	0.851182

Table of contents

Latent Variable Correlations

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y
X1	1.000000						
X2	0.697631	1.000000					
X3	0.339393	0.275229	1.000000				
X4	-0.346281	-0.195342	-0.171974	1.000000			
X5	0.391789	0.346851	0.435862	-0.141748	1.000000		
X6	0.309717	0.229013	0.297672	-0.149660	0.306788	1.000000	
Y	-0.697134	-0.668401	-0.625006	0.414142	-0.657801	-0.550449	1.000000

Table of contents

R Square

	R Square
X1	
X2	
X3	
X4	
X5	
X6	
Y	0.864829

Cross Loadings

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y
x1.1	0.918083	0.674114	0.323214	-0.358114	0.366049	0.295572	-0.673673
x1.2	0.900307	0.643183	0.245494	-0.381436	0.335863	0.237115	-0.609332
x1.3	0.889219	0.602256	0.286441	-0.288303	0.347043	0.230576	-0.572080
x1.4	0.868973	0.607395	0.288614	-0.240976	0.296001	0.344494	-0.613765
x1.5	0.877439	0.576794	0.363642	-0.269616	0.397896	0.267394	-0.629099
x2.1	0.655529	0.868587	0.273230	-0.198776	0.368795	0.171705	-0.639541
x2.2	0.632167	0.879314	0.179542	-0.233980	0.365847	0.182364	-0.621883
x2.3	0.640597	0.906482	0.226915	-0.195491	0.276547	0.194408	-0.577336
x2.4	0.658821	0.849148	0.294497	-0.182987	0.271250	0.199285	-0.608551
x2.5	0.419827	0.738934	0.180708	-0.060032	0.204084	0.199713	-0.427749

x2.6	0.393822	0.737754	0.209993	-0.036737	0.198330	0.221944	-0.393807
x3.1	0.273280	0.186168	0.659029	-0.101604	0.168107	0.067178	-0.392642
x3.2	0.200897	0.133088	0.704190	-0.051395	0.306183	0.121709	-0.381588
x3.3	0.247359	0.223149	0.689764	-0.127696	0.186570	0.074340	-0.395386
x3.4	0.170155	0.198066	0.773000	-0.062479	0.359913	0.290298	-0.488051
x3.5	0.258279	0.225354	0.789762	-0.072389	0.398240	0.328026	-0.529350
x3.6	0.188111	0.147353	0.793214	-0.173605	0.402799	0.236376	-0.461035
x3.7	0.308361	0.235253	0.703050	-0.180395	0.349879	0.251949	-0.473312
x3.8	0.340287	0.252574	0.746975	-0.226812	0.336301	0.294914	-0.511195
x4.1	-0.117852	-0.059083	-0.232595	0.554893	-0.074922	-0.173531	0.202783
x4.2	-0.171931	-0.025577	-0.117611	0.661062	-0.083113	-0.305920	0.231103
x4.3	-0.365595	-0.272698	0.053099	0.699187	-0.087969	0.001428	0.315351
x4.4	-0.284615	-0.159445	-0.255446	0.815681	-0.217475	-0.054188	0.407199
x4.5	-0.283949	-0.130382	-0.001043	0.701760	0.003751	0.004635	0.243112
x4.6	-0.115582	-0.087350	-0.145283	0.624164	-0.043354	-0.194093	0.214156
x5.1	0.393310	0.283193	0.367512	-0.225498	0.808162	0.201086	-0.553089
x5.2	0.345678	0.286337	0.277869	-0.169607	0.787597	0.290143	-0.509044
x5.3	0.293690	0.300225	0.337576	-0.038785	0.816287	0.269358	-0.516282
x5.4	0.283509	0.278126	0.362205	0.002639	0.809422	0.286613	-0.513743
x5.5	0.268805	0.257921	0.411257	-0.132990	0.824068	0.202850	-0.565075
x6.1	0.271272	0.180768	0.293461	-0.182266	0.297649	0.871282	-0.505483
x6.2	0.300360	0.251746	0.378648	-0.110609	0.380610	0.872890	-0.543392
x6.3	0.193653	0.171789	0.228278	-0.146349	0.256527	0.869495	-0.440309
x6.4	0.317957	0.205226	0.210141	-0.130690	0.163439	0.858158	-0.469856
x6.5	0.212405	0.143137	0.086847	-0.044031	0.159214	0.765435	-0.333787
y1.1	-0.594695	-0.541046	-0.560866	0.386433	-0.516756	-0.440404	0.807796
y1.2	-0.513741	-0.446428	-0.423800	0.335718	-0.506532	-0.447772	0.684450
y1.3	-0.517039	-0.557359	-0.518794	0.348863	-0.564842	-0.417638	0.851702
y1.4	-0.618166	-0.594150	-0.543079	0.310827	-0.562466	-0.511003	0.895169
y1.5	-0.521060	-0.509054	-0.422211	0.259652	-0.458032	-0.362690	0.717751

Table of contents

AVE

	AVE
X1	0.793830
X2	0.693450
X3	0.538584
X4	0.463526
X5	0.654803
X6	0.719883
Y	0.632579

Table of contents

Communality

	communality
X1	0.793830
X2	0.693450
X3	0.538583
X4	0.463525
X5	0.654803
X6	0.719883
Y	0.632579

Table of contents

Total Effects

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y
X1							-0.146463
X2							-0.305172
X3							-0.266371
X4							0.182178
X5							-0.277984
X6							-0.243361
Y							

Table of contents

Composite Reliability

	Composite Reliability
X1	0.950604
X2	0.930962
X3	0.902908
X4	0.836408
X5	0.904601
X6	0.927637
Y	0.894986

Table of contents

Outer Loadings

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y
x1.1	0.918083						
x1.2	0.900307						
x1.3	0.889219						
x1.4	0.868973						
x1.5	0.877439						
x2.1		0.868587					
x2.2		0.879314					
x2.3		0.906482					
x2.4		0.849148					
x2.5		0.738934					
x2.6		0.737754					
x3.1			0.659029				
x3.2			0.704190				
x3.3			0.689764				
x3.4			0.773000				
x3.5			0.789762				
x3.6			0.793214				
x3.7			0.703050				
x3.8			0.746975				
x4.1				0.554893			
x4.2				0.661062			
x4.3				0.699187			
x4.4				0.815681			
x4.5				0.701760			
x4.6				0.624164			
x5.1					0.808162		
x5.2					0.787597		
x5.3					0.816287		
x5.4					0.809422		
x5.5					0.824068		
x6.1						0.871282	
x6.2						0.872890	
x6.3						0.869495	
x6.4						0.858158	
x6.5						0.765435	
y1.1							0.807796
y1.2							0.684450
y1.3							0.851702

y1.4							0.895169
y1.5							0.717751

GAMBAR

